PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SRAGEN
ASRAMA BUMI SUKOWATI
NYAWIJI MELAYANI BUMI SUKOWATI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen Tahun 2024 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagai upaya perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan good and clean government.

Penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabiupaten Sragen Tahun 2024 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DPMPTSP Kabupaten Sragen, yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Hal ini mengacu pada pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami berharap semoga dokumen ini memberikan manfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan di waktu berikutnya.

Sragen, 27 Pebruari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
NIP. 19791225 199810 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dengan ini Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, target dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi, target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis, penjelasan atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Fokus laporan ini adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu

1. Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)
2. Jumlah PMA/ PMDN (investor)

Realisasi kinerja indikator Nilai realisasi penanaman modal tahun 2024 sebesar 2,3 trilyun rupiah sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 1,6 trilyun rupiah sehingga capaian kinerjanya sebesar 143% masuk kategori Sangat Baik. Realisasi kinerja indikator Jumlah PMA/ PMDN tahun 2024 sebesar 10.995 investor berdasarkan NIB (Nomor Induk Berusaha) melebihi target ditetapkan sebesar 3.000 investor sehingga capaian kinerjanya sebesar 367 % masuk kategori Sangat Baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. TUGAS DAN FUNGSI 3
1. Tugas Pokok 4
2. Fungsi 4
3. Cascading dan Proses Bisnis 6
C. STRUKTUR ORGANISASI 8
D. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN 9
1. Susunan Kepegawaian 9
2. Sarana dan Prasarana 11
E. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 11
F. SISTEMATIKA PENULISAN 12
G. TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023 13
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 16
A. REVIU RENCANA STRATEGIS 16
1. Visi dan Misi 16
2. Tujuan dan Sasaran 17
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 17
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 19
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 20
C. PERENCANAAN ANGGARAN 20
D. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA 23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 12
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 25
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 25

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 26
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 27
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangkamenengah 27
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 27

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN 28
D. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENDUKUNG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA 36
E. REALISASI ANGGARAN 49
F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 54

BAB IV. PENUTUP 55
A. KESIMPULAN 55
B. SARAN 56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Tahun 2024	10
Tabel 1.2	Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024	10
Tabel 1.3	Aset Yang Dimiliki	11
Tabel 1.4	Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023	14
Tabel. 2.1	Revisi Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Sragen	18
Tabel. 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
Tabel. 2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
Tabel. 2.4	Alokasi Anggaran DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2024	21
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja	24
Tabel 3.2	Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024	25
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Dua Tahun sebelumnya	26
Tabel. 3.4	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir tahun Renstra	27
Tabel. 3.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan RPJMD	27
Tabel. 3.6	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar Nasional	27
Tabel. 3.7	Analisis keberhasilan	28
Tabel. 3.8	Realisasi Investasi Tahun 2024	31
Tabel. 3.9	Realisasi PMA/PMDN Tahun 2024	32
Tabel. 3.10	Realisasi Investasi Tahun 2024 Berdasarkan Skala Usaha	34
Tabel. 3.11	Peningkatan Realisasi Investasi Tahun 2024 Berdasarkan Sektor Usaha	34
Tabel. 3.12	Analisis Pendukung/ Hambatan Capaian Kinerja	36
Tabel. 3.13	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang Mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis	43
Tabel. 3.14	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Yang Mendukung Sasaran Penunjang	46
Tabel. 3.15	Realisasi APBD DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2024	51
Tabel 3.16	Efisiensi Anggaran Tahun 2024	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen	7
Gambar 1.2	Peta Bisnis DPMPTSP Kabupaten Sragen	8
Gambar 1.3	Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen	9

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
S R A G E N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 000.8.6.3/361/18/2025

TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2024;

Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen; dan
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2024, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sistematika Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut ;

BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV PENUTUP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 27 - 02 - 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Investasi memiliki peran strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Dalam dokumen RPJMD 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Sragen menargetkan realisasi investasi 1,5 trilyun rupiah di awal kondisi RPJMD serta 1,7 trilyun rupiah di akhir tahun RPJMD. Target investasi tersebut dilakukan melalui investasi swasta dan pemerintah (PMA/PMDN) baik skala menengah besar, serta usaha mikro kecil. Dalam rangka peningkatan investasi swasta, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan mulai dari penyederhanaan/ kemudahan bidang perizinan serta peningkatan iklim kemudahan berusaha. Pertumbuhan investasi memiliki korelasi positif dengan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur perkembangan ekonomi suatu negara. Investasi menjadi salah satu komponen utama dalam perhitungan PDB dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, peningkatan nilai investasi akan berpengaruh positif terhadap peningkatan PDB dan sebaliknya. Posisi tersebut membuat investasi mempunyai peran strategis dalam perkembangan ekonomi negara. Investasi juga berdampak terhadap pencipataan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan daya beli masyarakat. Dampak tersebut relevan dengan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut semakin memperkuat peran strategis investasi dalam menciptakan kestabilan, perbaikan, serta peningkatan kondisi perekonomian Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sragen dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,87 persen pada tahun 2024. Namun, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 belum mengalami perlambatan yaitu sebesar 5,03 persen dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 5,05 persen.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen memiliki peran cukup penting dalam meningkatkan realisasi investasi serta menjadi focal point penghubung seluruh sektor investasi di Kabupaten Sragen, terutama antara pemerintah dan dunia usaha. Berdasarkan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sragen target realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp 1,60 triliun rupiah.

Pada tahun 2024, DPMPTSP Kabupaten Sragen meningkatkan realisasi investasi dan

melampaui target dengan capaian realisasi sebesar Rp 2,3 triliun atau sebesar 143% dari target Renstra 2021-2026. Dari data realisasi capaian tersebut, sebesar Rp 320 milyar (14%) merupakan PMA dan Rp 1,98 triliun (86%) merupakan PMDN. Peningkatan realisasi investasi ini berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 42.034 orang pada tahun 2024. Sektor realisasi PMA/ PMDN tertinggi tahun 2024, terdapat lima sektor, yaitu 1). Listrik, Gas dan Air, 2). Perdagangan & Reparasi, 3). Jasa Lainnya, 4). Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, serta 5). Industri Makanan.

Pada tahun 2024, realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar Rp 94 milyar rupiah apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, dengan pertumbuhan investasi menguat dari 3,81% menjadi 4,26%. Pada tahun 2023, realisasi investasi juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp 3,63% dari tahun 2022. Data ini menunjukkan bahwa tahun politik tidak berdampak signifikan terhadap tren realisasi investasi, sehingga pertumbuhan investasi masih terjaga.

DPMPTSP Kabupaten Sragen telah menyiapkan berbagai kebijakan yang digunakan sebagai pondasi dalam menghadapi berbagai tantangan realisasi penanaman modal ke depan. Kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan untuk merespon risiko yang berpengaruh pada tingkat pencapaian realisasi investasi, dalam rangka pengembangan penanaman modal ke depan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dan terintegrasi dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Sejalan dengan itu DPMPTSP Kabupaten Sragen menjalankan berbagai peran strategis tersebut dengan mengendepankan prinsip-prinsip good governance meliputi transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan fairness. Prinsip akuntabilitas menekankan pada komitmen dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara. Penyusunan Laporan kinerja ini disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini sebagai pijakan upaya untuk terus melakukan inovasi dan transformasi kinerja kelembagaan instansi pemerintah yang produktif, efisien, serta efektif kedepannya. Selain itu, laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban serta penyampaian informasi kepada publik terkait realisasi anggaran serta berbagai capaian kinerja sepanjang tahun 2024. DPMPTSP Kabupaten Sragen juga terus berupaya mewujudkan salah satu perangkat daerah yang andal, profesional, inovatif, dan berintregritas dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Berkenaan dengan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam salah satu pasal menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, DPMPTSP Kabupaten Sragen selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi DPMPTSP Kabupaten Sragen sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Salah satu wujud pencapaian kinerja tersebut adalah diperolehnya Predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2024. Sebuah pencapaian yang sangat membaggakan sebagai perwujudan kinerja yang berintegritas.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli

Bupati Kabupaten Sragen. DPMPTSP Kabupaten Sragen melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

1. Tugas Pokok

a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, DPMPTSP Kabupaten Sragen melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

a. Kepala Dinas;

   Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

b. Sekretariat, membawahi:
   1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

   Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen.

   Sekretariat mempunyai fungsi ;

1) Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen;
2) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen;
3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen;
4) Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset, dan jasa penunjang di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen;
5) Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen;
6) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sragen;
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya;

c. Kelompok Substansi Penanaman Modal, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok Substansi Penanaman Modal mempunyai fungsi;

1) Penyusunan bahan program kerja di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi ;

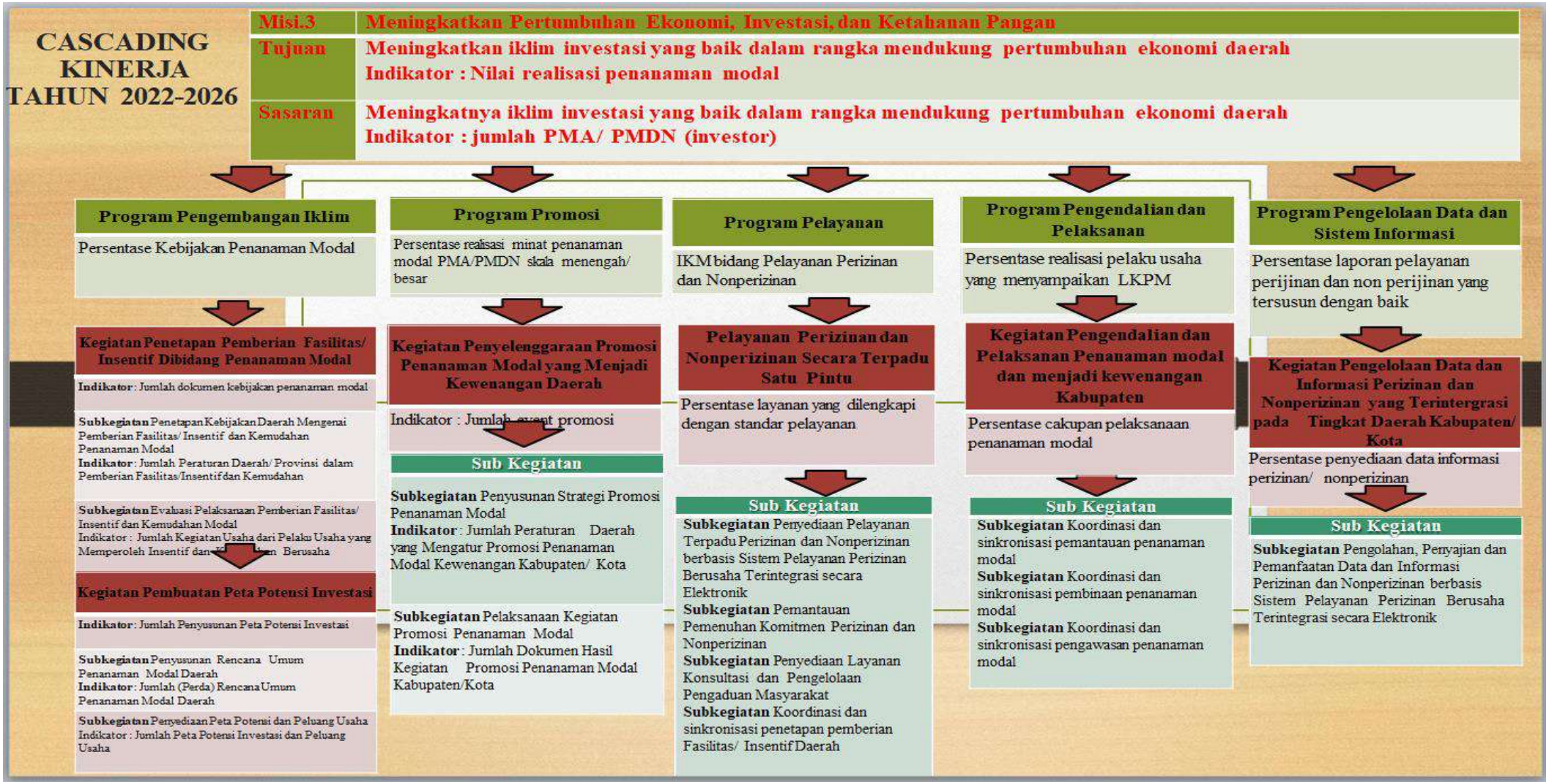
1) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
5) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah, Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
6) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Cascading dan Proses Bisnis

a. Cascading Kinerja

DPMPTSP Kabupaten Sragen dalam melaksanakan mandat kinerja dituangkan dalam Cascading Kinerja sebagai berikut;

Gambar 1.1
Cascading Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen

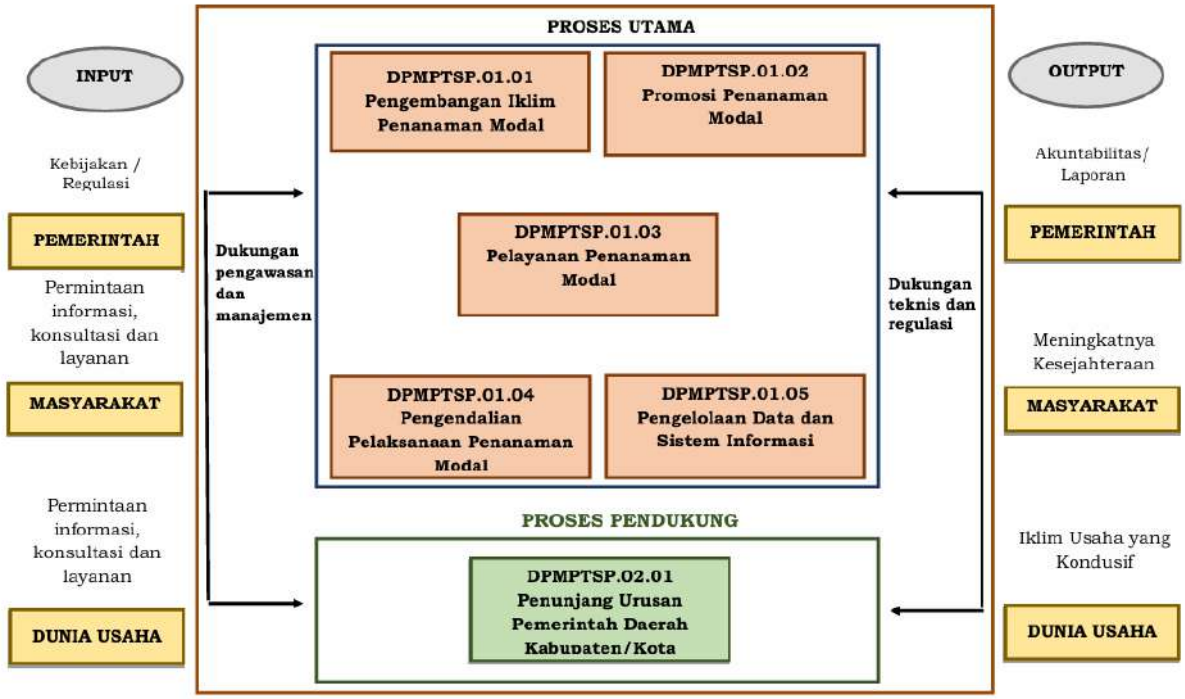


b. Proses Bisnis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman kepada Proses Bisnis. Tujuannya untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antarinstansi dan / atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sesuaidengan visi dan misi dalam menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi parapemangku kepentingan sebagai berikut :

Gambar 1.2

Peta Bisnis DPMPTSP Kabupaten Sragen

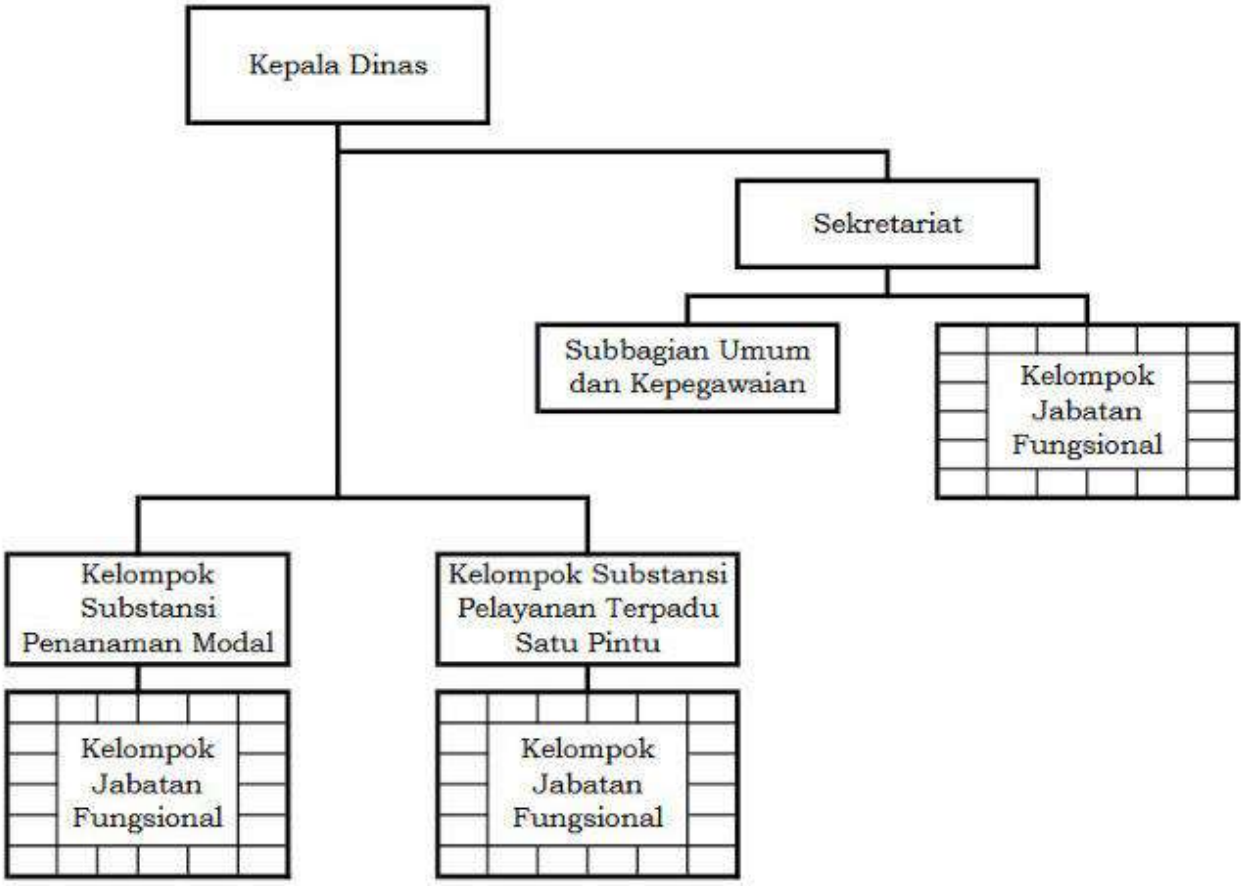


C. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sesuai dengan bagan dibawah ini:

Gambar 1.3

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sragen



Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (human resources) DMPTSP Kabupaten Sragen merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

D. DUKUNGAN SUMBERDAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

1. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai/personil Dinas DMPTSP Kabupaten Sragen sebanyak 45 orang terdiri dari :

a Pegawai ASN : 22 orang

b. Pegawai Non ASN : 23 orang

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Tahun 2024

Golongan / Ruang	Esselon			JF	Staf	Jumlah
	II	III	IV			
Golongan IV/c						
Golongan IV/b	1	1				
Golongan IV/a			1	1		
Jumlah Golongan IV	1	1	1	1	0	4
Golongan III/d				10	2	
Golongan III/c				0	1	
Golongan III/b					2	
Golongan III/a					1	
Jumlah Golongan III	0	0	0	10	6	16
Golongan II/d						
Golongan II/c				1		
Golongan II/b						
Golongan II/a						
Jumlah Golongan II	0	0	0	1		1
Golongan I/d						
Golongan I/c						
Golongan I/b						
Golongan I/a						
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0
PPPK	0	0	0	0	1	
Jumlah PPPK	0	0	0	0	1	1
Jumlah Non ASN	0	0	0	0	23	22
Total	1	1	1	12	30	45

Sumber data : DPMPTSP Tahun 2024

Tabel 1.2

Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

No	Pendidikan	Jumlah
1	DOKTOR (S3)	-
2	PASCASARJANA (S2)	5
3	SARJANA (S1)	14
4	SARJANA MUDA (D3)	3
5	SLTA / SMEA / MA	0
6	SLTP	0
7	SD	0
JUMLAH		22

Sumber data : DPMPTSP Tahun 2024

2. Sarana dan Prasarana

Aset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut;

Tabel 1.3
Aset Yang Dimiliki

	ASET	**22.129.361.697**
1	**Tanah**	0
2	**Peralatan Dan Mesin**	3.777.078.923
2	Alat-alat Angkutan	1.327.449.896
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.261.061
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.910.000
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	9.825.000
7	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	28.414.473
8	Alat Laboratorium	1.015.229.000
10	Komputer	1.356.562.493
15	Alat Keselamatan Kerja	12.427.000
3	**Gedung dan Bangunan**	
1	Bangunan dan Gedung	17.808.057.774
4	**Jalan Jaringan dan Irigasi**	
	Bangunan Air	193.175.000
5	**Aset Tidak Berwujud**	
1	Aset Tidak Berwujud	318.315.000
6	**Aset Lain-lain**	
4	Aset Lain-lain	32.735.000

E. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. Permasalahan yang dihadapi antara lain;

1. Perencanaan Penanaman Modal belum optimal;
2. Belum optimalnya kualitas promosi penanaman modal;
3. Terdapat potensi investasi yang belum teridentifikasi;
4. Belum optimalnya penyusunan kajian investasi;

5. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (One Single Submission) belum optimal; dan
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi system;
7. Pelayanan belum menjangkau seluruh jenis layanan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Perlunya koordinasi dan integrasi perencanaan kebijakan penanaman modal;
2. Penyusunan kajian investasi dan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal;
3. Optimalisasi kerjasama penanaman modal dengan stake holder;
4. Optimalisasi kegiatan pengawasan penanaman modal, termasuk pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha;
5. Belum optimalnya dukungan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronika;
6. Optimalisasi pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi (mal pelayanan publik);
7. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat dan;
8. Peningkatan inovasi layanan investasi serta perizinan dan nonperizinan;

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Sragen ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun sistematika penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

   Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sering dihadapi organisasi. Di dalam bab I terdapat pula tindak lanjut LHE AKIP 2023.
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

   Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan, dengan sistematika sebagai berikut:

   a. Reviu Rencana Strategis
   b. Indikator Kinerja Utama

c. Perjanjian Kinerja Tahun bersangkutan

d. Perencanaan Anggaran Tahun bersangkutan

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi, dari setiap sasaran strategis.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan meningkatkan kinerjanya.

G. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2023 Nomor 700.1.2.1/198/1-03/2024 tanggal 28 Juli 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, yang mengacu kepada rekomendasi Tim Evaluator Inspektorat Kabupaten Sragen. Tindak lanjut tersebut sesuai tabel berikut.

Tabel 1.3
Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjut
1.	Memastikan kembali Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Bupati tidak mencantumkan sasaran program.	Dilakukan Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Bupati, tidak mencantumkan sasaran program.
2.	Melakukan peninjauan atas capaian target kinerja berdasarkan hasil realisasi kinerja periode sebelumnya agar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan target di periode berikutnya agar tetap memicu peningkatan kinerja.	Telah dilakukan peninjauan atas capaian kinerja realisasi periode sebelumnya sebagai dasar penentuan target di periode berikutnya.
3.	Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) dan ditetapkan dengan mendasarkan Penjenjangan Kinerja dan Matrik Peran Pembagian Hasil yang diidentifikasi serta menggambarkan keselarasan kinerja individu dengan kinerja organisasi sebagai dasar menyusun Perjanjian Kinerja dan SKP.	Telah disusun Indikator Kinerja Individu (IKI) berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 800/135/18/2025tentang Indikator Kinerja Individu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025
4.	Meningkatkan kualitas pelaporan monitoring per triwulan dan evaluasi rencana aksi dengan berfokus pada analisis faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan/ kegagalan dalam capaian kinerja serta analisis terhadap efektifitas program/ kegiatan serta sumberdaya yang ada terhadap capaian kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi yang spesifik sesuai dengan masalah yang dihadapi dan tindaklanjut dalam penentuan strategi dan perbaikan kinerja di periode berikutnya.	Telah disusun pelaporan monitoring per triwulan dan evaluasi rencana aksi dengan berfokus pada analisis faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan/ kegagalan dalam capaian kinerja serta analisis terhadap efektifitas program/ kegiatan serta sumberdaya yang ada terhadap capaian kinerja tahun 2024.

5.	Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja berkala dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam terhadap capaian IKU, capaian program/ kegiatan, capaian realisasi anggaran dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi, hambatan/ kendala dan faktor pendukung keberhasilan atas kinerja serta rekomendasi dalam rangka perbaikan kinerja.	Telah disusun pelaporan kinerja berkala (*interim)* setiap tri wulan di tahun 2024 yang menganalisis capaian IKU, capaian program/ kegiatan, capaian realisasi anggaran dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi, hambatan/ kendala dan faktor pendukung keberhasilan atas kinerja serta rekomendasi dalam rangka perbaikan kinerja.
6.	Melakukan pemantauan tindaklanjut atas saran/ rekomendasi laporan kinerja tahunan perangkat daerah, laporan kinerja secara berkala dan monev atas rencana aksi serta memanfaatkannya sebagai umpan balik dalam perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.	Telah disusun laporan pemantauan tindaklanjut atas saran/ rekomendasi laporan kinerja tahunan perangkat daerah, laporan kinerja secara berkala dan monev atas rencana aksi tahun 2024.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. REVIU RENCANA STRATEGIS

Reviu Rencana Strategis 2021–2026 dijadikan acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan guna menentukan rencana, program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran agar dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sragen, selain itu diharapkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam urusan penanaman modal.

Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 merupakan acuan dalam perencanaan, pemrograman dan penganggaran berbasis kinerja untuk menyusun dokumen Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sragen. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang sangat menentukan agar mampu menjawab tantangan kinerja serta tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas, terukur dan terpadu, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dankendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada serta harus mendukung tercapainya target kinerja yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 tahun.

1. Visi dan Misi
   - Visi

     Visi Bupati Sragen “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”
   - Misi

     Dalam mencapai Visi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen menerapkan Misi Kepala Daerah dan Pembangunan Daerah agar Visi yang diharapkan dapat tercapai yaitu: “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ketahanan Pangan”

2. Tujuan dan Sasaran

- Tujuan

  Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan misi tersebut diatas, maka tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut "Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah" Dengan indikator tujuan sebagai berikut "Nilai realisasi penanaman modal"

- Sasaran

  Adapun sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut "Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah" dengan indikator kinerja "Jumlah PMA/PMDN (investor)".

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah untuk ke depannya, sehingga bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai komitmen dalam peningkatan hasil kinerja instansi, Indikator Kinerja Utama DPMPTSP 2021-2026 Kabupaten Sragen telah dilakukan revisi pada target pencapaian setiap tahunnya.

Tabel 2.1

Revisi

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Sragen

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)	TARGET					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5					6
1.	TUJUAN : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)	• **Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah . • **Formulasi Pengukuran:** Nilai investasi dalam tahun berjalan. • **Tipe Perhitungan:** Kumulatif • **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	8,00
1.1	SASARAN : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/investor)	• **Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam peningkatan iklim usaha yang berdaya saing dan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha, yang mendukung peningkatan jumlah PMA/ PMDN (investor). • **Formulasi Pengukuran:** Jumlah PMA/ PMDN berdasarkan jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam tahun berjalan. • **Tipe Perhitungan:** Komulatif • **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal	1.250	1.313	3.000	3.250	3.500	12.313

1. Perjanjian Kinerja

Melalui perjanjian kinerja ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan pimpinan perangkat daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Selain itu juga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Tujuan Strategis : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	1,60	trilyun rupiah
2	Sasaran Strategis: Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	3.000	investor
3	Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitaskinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,40)	predikat

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	5.629.365.719	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	120.000.000	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	131.500.000	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	418.034.000	DAU
5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	582.619.000	DAU
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	32.000.000	DAU
	Jumlah	6.913.518.719	

2. Perubahan Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Tujuan Strategis : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	1,60	trilyun rupiah
2	Sasaran Strategis: Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	3.000	investor
3	Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitaskinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,40)	predikat

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/ Kota	5.616.669.524	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	120.000.000	DAU
3	Program Promosi PenanamanModal	128.356.500	DAU
4	Program Pelayanan PenanamanModal	381.247.000	DAU
5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan	582.619.000	DAK NON FISIK
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	32.000.000	DAU
	JUMLAH	6.860.892.024	

C. PERENCANAAN PENGANGGARAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dalam melaksanakan kegiatan di bidang penanaman modal dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.4

Alokasi Anggaran DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Belanja Operasi	Belanja Modal	Sumber Dana
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**6.860.892.024**	**6.436.197.718**	**424.694.306**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.616.669.524**	**5.191.975.218**	**424.694.306**	DAU
2.18.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.338.000**	**4.338.000**	**0**	**DAU**
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.224.000	2.224.000	0	DAU
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.114.000	2.114.000	0	DAU
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.478.501.218**	**3.478.501.218**	**0**	**DAU**
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.478.501.218	3.478.501.218	0	DAU
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**104.538.000**	**104.538.000**	**0**	**DAU**
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.118.000	10.118.000	0	DAU
2.18.01.2.05.00011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	94.420.000	94.420.000	0	DAU
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**607.279.000**	**424.973.000**	**182.306.000**	**DAU**
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.570.000	35.570.000	0	DAU
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	276.654.000	94.348.000	182.306.000	DAU
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.180.000	75.180.000	0	DAU
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.375.000	91.375.000	0	DAU
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	4.000.000	0	DAU
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.500.000	111.500.000	0	DAU
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.000.000	13.000.000	0	DAU
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**230.297.306**	**0**	**230.297.306**	**DAU**
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	53.340.000	0	53.340.000	DAU
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.957.306	0	176.957.306	DAU
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**916.712.000**	**904.621.000**	**12.091.000**	**DAU**
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.994.000	4.994.000	0	DAU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	466.936.000	466.936.000		DAU
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.256.000	66.395.000	5.861.000	DAU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.526.000	366.296.000	6.230.000	DAU
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**275.004.000**	**275.004.000**	**0**	**DAU**
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.681.000	57.681.000	0	DAU

2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.228.000	102.228.000	0	DAU
2.18.01.2.09.0003	Pemeliharaan Mebel	16.011.000	16.011.000	0	DAU
2.18.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.760.000	15.760.000	0	DAU
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.720.000	43.720.000	0	DAU
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.604.000	39.604.000	0	DAU
2.18.02.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**120.000.000**	**120.000.000**	**0**	**DAU**
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**120.000.000**	**120.000.000**	**0**	**DAU**
2.18.02.2.02.0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	120.000.000	120.000.000	0	DAU
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**128.356.500**	**128.356.500**	**0**	**DAU**
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**128.356.500**	**128.356.500**	**0**	**DAU**
2.18.01.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	128.356.500	128.356.500	0	DAU
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**381.247.000**	**381.247.000**	**0**	**DAU**
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**381.247.000**	**381.247.000**	**0**	**DAU**
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	70.000.000	70.000.000		DAU
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	113.264.000	113.264.000	0	DAU
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis risiko	45.000.000	45.000.000	0	DAU
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	152.983.000	152.983.000	0	DAU
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**582.619.000**	**582.619.000**	**0**	**DAK NF**
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**582.619.000**	**582.619.000**	**0**	**DAK NF**
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	407.834.000	407.834.000	0	DAK NF
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	174.785.000	174.785.000	0	DAK NF
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**32.000.000**	**32.000.000**	**0**	**DAU**
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**32.000.000**	**32.000.000**	**0**	**DAU**
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	32.000.000	32.000.000	0	DAU

D. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

1. Aplikasi GRMS/SSO

   Untuk mendukung tercapainya kinerja yang optimal dan penerapan SAKIP yang baik sebagai perwujudan good governance, maka DPMPTSP Kabupaten Sragen menggunakan instrument pendukung dari Sistem GRMS/SSO yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, seperti sirenja, SIPD, e-kinerja, e-monevrkpd serta e-sakip yang berfungsi untuk membantu pekerjaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja SKPD.

2. Aplikasi Pendukung Lainnya

   Selain menggunakan aplikasi tersebut di atas, DPMPTSP Kabupaten Sragen juga memanfaatkan aplikasi dalam meningkatkan kinerja dan untuk memudahkan dalam pelayanan sesuai tugas pokok urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Aplikasi tersebut antara lain ;

   a. OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Aproach) aplikasi yang telah disediakan oleh BKPM RI dalam mendukung layanan perizinan dan non perizinan berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja.
   b. SIPIONER adalah Sistem Perizinan Online Sragen, aplikasi layanan perizinan dan nonperizinan yang tidak termasuk dalam OSS RBA.
   c. Layanan Bergerak adalah Layanan Pendampingan dan Jemput Bola, yaitu layanan mobile dan pendampingan bagi pelaku usaha terutama di wilayah dengan jangkauan yang jauh dari pusat kota.
   d. SiPelangi adalah Sistem Informasi Peluang Investasi, yaitu palikasi yang memudahkan bagi calon investor untuk mendapatkan informasi tentang tata ruang wilayah Kabupaten Sragen.
   e. PASTI-OL adalah Peta Pesebaran Investasi, yaitu aplikasi yang menyediakan informasi pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Sragen.
   f. SIAP adalah Sistem Informasi Aduan Perizinan, yaitu aplikasi layanan pengaduan masyarakat guna mendukung tindak lanjut penyelesaian aduan masyarakat terkait perizinan dan layanan DPMPTSP.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran Kinerja di DPMPTSP Kabupaten Sragen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja, melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Adapun rumus pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:
   $$\%\ capaian\ kinerja = \frac{realisasi}{rencana} x100\%$$
2. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:
   $$\%\ capaian\ kinerja = \frac{rencana - (realisasi - rencana)}{rencana} x\ 100\%$$
3. Untuk target indikator yang bersifat kumulatif dilakukan penghitungan pencapaian kinerja dengan rumus yang sama dengan poin 1:
   $$\%\ capaian\ kinerja = \frac{realisasi}{rencana} x100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	85 % - 100 %	Baik
3	65 % - 74,99 %	Cukup
4	55% - 64,99%	Kurang
5	Kurang dari 55 %	Sangat Kurang

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan realisasi pencapaiannya.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Sragen beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.2

Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

NO		TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN			
					TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)	KATEGORI
1		2	3	5	6	7	8	9
		Tujuan Strategis : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	trilyun rupiah	1,60	2,3	143%	Sangat Baik
		Sasaran Strategis: Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	investor	3.000	10.995	367%	Sangat Baik
		Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	predikat	BB (70,40)	BB (76,15)	108%	Sangat Baik

Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dengan kategori Sangat Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024, Sangat Baik.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

NO		TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomidaerah	Jumlah Nilai investasi	1,50	2,1	140%	1,55	2,2	142%	1,60	2,3	142%
		Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomidaerah	Jumlah PMA/ PMDN	1.250	8770	702%	1.313	14936	1.138%	3.000	10.995	367%
		Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,10)	BB (68,95)	98%	BB (70,30)	BB (70,90)	101%	BB (70,40)	BB (76,15)	108%

Pada tabel diatas adalah perbandingan capaian pada 3 (tiga) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024. Apabila dilihat dari realisasi dan capaiannya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan atau dengan kategori Sangat Baik.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

NO		TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET RENSTRA			
				TARGET TAHUN 2026	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
1		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	1,7	2,32	135%	Melebihi Target
1	1	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	6.907	10.995	159%	Melebihi Target

Dari tabel diatas dapat diketahui perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan target Akhir Renstra tahun 2026, bahwa sampai dengan tahun 2024 capaian kinerja telah melebihi target.

4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

NO		TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET RPJMD			
				TARGET TAHUN 2026	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
1		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	1,7	2,32	135%	Melebihi Target
1	1	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	6.907	10.995	159%	Melebihi Target

Dari tabel diatas dapat diketahui perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan target Akhir RPJMD tahun 2026, bahwa sampai dengan tahun 2024 capaian kinerja telah melebihi target.

5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

NO		TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STANDAR NASIONAL		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhanekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi (trilyun rupiah)	1.650	1.714,2	103,9%
1	1	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	-	-	-

Dari tabel diatas dapat diketahui perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan target nasional tahun 2024, bahwa sampai dengan tahun 2024 capaian kinerja lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan

NO		TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TAHUN 2024					
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi (trilyun rupiah)	1,60	2,3	144%	Sangat Baik	Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA) yang dibuktikan adanya peningkatan IKM bidang perizinan. Selain peningkatan layanan bidang investasi antara lain Bimbingan teknis bagi pelaku usaha, serta pendampingan penyusunan laporan kegioatan penanaman modal (LKPM). Upaya lain yang dilakukan antara lain penyusunan dokumen kebijakan bidang penanaman modal, peningkatan promosi, layanan	Peningkatan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan baik layanan perizinan berusaha maupun layanan investasi serta koordinasi lintas sektor yang menciptakan rasa nyaman dalam berinvestasi.

								perizinan secara online non OSS RBA serta penyediaan data perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi dengan sistem informasi layanan. Selain itu tersedianya aplikasi yang mendukung layanan informasi peluang investasi. Beberapa faktor tersebut di atas sangat membantua dalam pencapaian kinerja.	
1	1	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	3000	10.995	367%	Sangat Baik	Meningkatnya realisasi investasi dipengaruhui oleh jumlah PMA/PMDN yang ada di Kabuipaten Sragen. Dengan capaian realisasi investasi yang optimal, diharapkan meningkat pula jumlah PMA/PMDN. Peningkatan PMA/PMDN dipengaruhi oleh faktor meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, serta kemudahan layanan antara layanan Online Single Submission Risk Based Aproch (OSS-RBA),	Bahwa peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat bagi calon investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya peningkatan kepeminatan investasi diharapkan berbading lurus dengan meningkatnya jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Sragen. Iklim investasi yang kondusif sangat membantu peningkatan pelaku usaha yang akan membuka usaha di

								SIPIONER (Sistem Informasi Perizinan Online Sragen) dan Si-Pelangi (Sistem Informasi Peluang Investasi) pendampingan penyusunan LKPM	Kabupaten Sragen.

Realisasi investasi tahun 2024 tersebar pada banyak sektor dengan sektor perdagangan/jasa lebih mendominasi disusul sektor industri makanan. Adapun persebaran sektor investasi sebagai berikut;

Tabel 3.8

Realisasi Investasi Tahun 2024

No	SEKTOR	JUMLAH		
		Proyek	Investasi	Naker
1	Tanaman Pangan, Perkebunan	1.579	36.468.020.000	2.329
2	Peternakan	331	14.434.000.000	506
3	Kehutanan	20	411.000.000	37
4	Perikanan	354	13.810.500.000	507
5	Pertambangan	32	13.737.100.000	206
6	Industri Makanan	1.875	164.447.455.003	3.222
7	Industri Tekstil	334	135.116.949.900	3.069
8	Industri kulit, Barang dari Kulit dan Alas Sepatu	5	20.655.005.000	130
9	Industri Kayu	46	1.568.000.000	80
10	Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan	42	3.836.000.000	95
11	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	61	9.241.000.000	142
12	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	65	91.951.000.000	331
13	Industri Mineral Non Logam	30	33.713.100.000	348
14	Industri Dasar Logam, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatanya	91	6.643.000.000	151
15	Industri Mesin, Elektronik, Peralatan Listrik, Instrumen Kedokteran dan Optik	88	3.458.300.000	223
16	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	6	1.150.000.000	22
17	Industri Lainya	133	41.490.500.000	13.261
18	Listrik, Gas dan Air	68	652.347.037.156	234
19	Konstruksi	524	65.696.265.572	1.226
20	Perdagangan & Reparasi	4.838	359.728.873.788	8.417
21	Hotel dan Restoran	1.245	63.124.050.011	3.434
22	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	218	116.154.443.155	547
23	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	65	205.128.550.001	449
24	Jasa Lainnya	972	247.944.067.239	3.068
	JUMLAH TOTAL	13.022	2.302.254.216.825	42.034

Tabel . 3.9

Realisasi PMA/PMDN Tahun 2024

NO	BULAN	PMA				PMDN			
		JML PROYEK	JUMLAH INVESTOR (NIB)	INVESTASI	TENAGA KERJA	JML PROYEK	JUMLAH INVESTOR (NIB)	INVESTASI	TENAGA KERJA
1	JANUARI					1.271	1.011	176.059.316.486	2.508
2	FEBRUARI	1	1	67.500.000.000	100	859	653	89.670.683.943	1.767
3	MARET					2.043	2.010	104.029.795.009	3.127
	REALISASI INVESTASI TW I	1	1	67.500.000.000	100	4.173	3.674	369.759.795.438	7.402
4	APRIL	2	2	33.500.000.000	1.054	587	471	58.643.694.003	1.289
5	MEI	10	3	154.535.168.900	671	1.497	1.247	517.422.793.347	3.725
6	JUNI	1	1	10.180.000.000	10	1.162	872	136.402.474.825	3.573
	REALISASI INVESTASI TW II	13	6	198.215.168.900	1.735	3.246	2.590	712.468.962.175	8.587
7	JULI	1	1	23.500.000.000	150	1.439	1.249	205.935.861.097	3.002
8	AGUSTUS	2	2	21.000.000.001	12.015	1.079	852	145.427.598.054	2.146
9	SEPTEMBER	1	1	10.000.005.000	5	849	761	375.126.202.328	1.981
	REALISASI INVESTASI TW III	4	4	54.500.005.001	12.170	3.367	2.862	726.489.661.479	7.129
10	OKTOBER	-	-	-	-	842	729	60.624.031.901	1.776
11	NOVEMBER	-	-	-	-	731	598	58.251.182.666	1.546
12	DESEMBER	-	-	-	-	645	531	54.445.409.265	1.589
	REALISASI INVESTASI TW IV	-	-	-	-	2.218	1.858	173.320.623.832	4.911
	REALISASI INVESTASI TW I - IV	18	11	320.215.173.901	14.005	13.004	10.984	1.982.039.042.924	28.029
	TOTAL PMA & PMDN					13.022	10.995	2.302.254.216.825	42.034

Berikut hal penting capaian realisasi investasi tahun 2024 sebagai berikut;

1. Realisasi investasi dan melampaui target dengan capaian realisasi investasi sebesar Rp 2,3 triliun atau sebesar 143% dari target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra 2021-2026. Dari data realisasi capaian tersebut, sebesar Rp 320 milyar (14%) merupakan PMA dan Rp 1,98 triliun (86%) merupakan PMDN. Peningkatan realisasi investasi ini berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 42.034 orang pada tahun 2024. Sektor realisasi PMA dan PMDN tertinggi pada tahun 2024, terdapat lima sektor yaitu;
   a. Listrik, Gas dan Air,
   b. Perdagangan & Reparasi,
   c. Jasa Lainnya,
   d. Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, dan
   e. Industri Makanan.
2. Realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar Rp 94 milyar rupiah apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, dengan pertumbuhan investasi menguat dari 3,78% menjadi 4,26%. Pada tahun 2023, realisasi investasi juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp 3,63% dari tahun 2022. Data ini menunjukkan bahwa tahun politik tidak berdampak signifikan terhadap trend realisasi investasi, sehingga pertumbuhan investasi masih terjaga.
3. Realisasi PMDN pada Tahun 2024 sebesar Rp. 1.982 milyar sedikit terkoreksi sebesar 1,69% dibandingkan realisasi PMDN Tahun 2023 sebesar Rp. 2.016,3 milyar. Adapun sektor PMDN meliputi ; 1). Sektor Listrik, Gas dan Air (28,34%), 2). Sektor Perdagangan dan Reparasi (15,18%), 3). Sektor Jasa Lainnya (9,50%), 4). Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (8,91%), dan 5). Industri Makanan (7,14%).
4. Sedangkan Realisasi PMA pada Tahun 2024 sebesar Rp. 320,2 milyar naik sebesar 66,94% dibandingkan realisasi PMA Tahun 2023 sebesar Rp. 191,8 milyar. Adapun sektor PMA meliputi ; 1). Sektor industri Tekstil (4,83%), 2). Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik (3,95%), 3). Sektor Transportasi gudang dan telekomunikasi (1,31%), 4). Sektor Jasa Lainnya (1,27%), dan 5). Industri Lainnya (1,22%).
5. Realisasi investasi tahun 2024 apabila dikelompokkan pada skala usaha sebagaimana tabel berikut;

Tabel. 3.10

Realisasi Investasi Tahun 2024 Berdasarkan Skala Usaha

No.	Skala Usaha	Nilai investasi (juta rupiah)	Jumlah
1.	Mikro (1- 1.000.000.000)	567.578	10.791
2.	Kecil (1.000.000.001-5.000.000.000)	307.366	154
3.	Menengah (5.000.000.001 - 10.000.000.000)	153.164	24
4.	Besar (di atas 10.000.000.000)	1.274.146	26
	Jumlah	2.302.254	10.995

Berdasarkan data realisasi investasi di Kabupaten Sragen, tahun 2020 nilai investasi sebesar 1.980,110 milyar didominasi usaha skala besar yakni sebesar 1.203,746 milyar dan usaha skala mikro sebesar 159,404 milyar. Tingkat pertumbuhan fluktualitf, namun setiap tahun terjadi kenaikan nilai investasi, dengan pertumbuhan investasi tahun 2024 sebesar 4,26 %, dan akhir tahun 2024 tercatat nilai investasi mencapai 2.302,254 milyar.

6. Pertumbuhan Realisasi sektor investasi tahun 2024 sebagaimana tabel berikut;

Tabel. 3.11

Peningkatan Realisasi Investasi Tahun 2024 Berdasarkan Sektor Usaha

SEKTOR	REALISASI INVESTASI		%
	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
2	3	4	5
Industri kulit, Barang dari Kulit dan Alas Sepatu	226.000.000	20.655.005.000	9039,38%
Listrik, Gas dan Air	14.440.833.338	652.347.037.156	4417,38%
Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	392.151.650	1.150.000.000	193,25%
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	46.002.327.824	116.154.443.155	152,50%
Industri Mineral Non Logam	14.754.700.000	33.713.100.000	128,49%
Industri Mesin, Elektronik, Peralatan Listrik, Instrumen Kedokteran dan Optik	2.716.735.000	3.458.300.000	27,30%
Pertambangan	12.487.235.000	13.737.100.000	10,01%
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	215.494.125.001	205.128.550.001	-4,81%
Hotel dan Restoran	66.564.535.012	63.124.050.011	-5,17%
Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan	4.137.500.000	3.836.000.000	-7,29%
Perdagangan & Reparasi	406.328.443.859	359.728.873.788	-11,47%

Konstruksi	76.763.838.816	65.696.265.572	-14,42%
Perikanan	16.154.500.000	13.810.500.000	-14,51%
Industri Tekstil	169.143.900.000	135.116.949.900	-20,12%
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	140.262.090.000	91.951.000.000	-34,44%
Peternakan	22.040.500.000	14.434.000.000	-34,51%
Industri Makanan	255.674.240.008	164.447.455.003	-35,68%
Jasa Lainnya	390.761.404.742	247.944.067.239	-36,55%
Industri Dasar Logam, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatanya Bukan Mesin dan Peralatanya	14.299.000.000	6.643.000.000	-53,54%
Tanaman Pangan, Perkebunan	83.005.950.000	36.468.020.000	-56,07%
Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	30.243.800.000	9.241.000.000	-69,44%
Industri Kayu	6.897.200.000	1.568.000.000	-77,27%
Industri Lainya	211.766.156.845	41.490.500.000	-80,41%
Kehutanan	7.651.500.000	411.000.000	-94,63%
JUMLAH TOTAL	2.208.208.667.095	2.302.254.216.825	4,26%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa peningkatan sektor investasi di Kabupaten Sragen, tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2023 dengan urutan lima besar yaitu 1). Industri kulit, Barang dari Kulit dan Alas Sepatu, 2). Listrik, Gas dan Air, 3). Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya, 4). Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi, 5). Industri Mineral Non Logam. Dengan komposisi tersebut diartikan bahwa peningkatan sektor investasi sector sekunder lebih mendominasi selain juga terdapat peningkatan pada sector Tertier. Hal ini dapat diartikan bahwa sektor Sekunder lebih menarik bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Selain itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Sragen, karena mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Disisi lain penimgkatan pada sektor Primer relatif kecil atau bahkan mengalami penurunan. Hal ini kiranya diperlukan sebuah kebijakan penanaman modal pada sektor Primer, mengingat wilayah Kabupaten Sragen merupakan salah satu wilayah peyangga pangan di Jawa Tengah.

7.

D. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENDUKUNG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA.

Tabel. 3.12

Analisis Pendukung/ Hambatan Capaian Kinerja

NO					TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN (MENDUKUNG/ TIDAK MENDUKUNG)
1					2	3	4	5	6	7	8
1					Tujuan Strategis : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi (trilyun rupiah)	144%				
1	1				Sasaran Strategis : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	367%				
2	18	2						PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]	100%	Mendukung
2	18	2	01					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]	100%	Mendukung

2	18	2	01	02				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota [Dokumen]	100%	Mendukung
2	18	3	01					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/ besar [%]	135%	Mendukung
2	18	3	01	01				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah even promosi [kali]	100%	Mendukung
2	18	3	01	02				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota [Dokumen]	100%	Mendukung
2	18	4						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Nonperizinan [poin]	107%	Mendukung
2	18	4	01					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100%	Mendukung
2	18	4	01	05				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah[Kegiatan Usaha]	100%	Mendukung
2	18	4	01	06				Penyediaan Pelayanan TerpaduPerizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]	137%	Mendukung

2	18	4	01	07				Penyediaan Layanan Konsultasidan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan [Orang]	111%	Mendukung
2	18	4	01	08				Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [kegiatan usaha)	131%	Mendukung
2	18	5						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]	540%	Mendukung
2	18	5	01					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100%	Mendukung
2	18	5	01	02				Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko [pelaku usaha]	100%	Mendukung
2	18	5	01	03				Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha [kegiatan usaha]	132%	Mendukung

2	18	6						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]	100%	Mendukung
2	18	6	01					Pengelolaan Data dan InformasiPerizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/ nonperizinan [%]	100%	Mendukung
2	18	6	01	01				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasisecara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan [dokumen]	200%	Mendukung
					Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	108%				Mendukung
2	18	1						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]	100%	Mendukung
2	18	1	01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]	125%	Mendukung
2	18	1	01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [dokumen]	150%	Mendukung
2	18	1	01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Mendukung

2	18	1	02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	100%	Mendukung
2	18	1	02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/ bulan]	92%	Mendukung
2	18	1	05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [dokumen]	100%	Mendukung
2	18	1	05	01				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33%	Mendukung
2	18	1	05	11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	Mendukung
2	18	1	06					Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	100%	Mendukung
2	18	1	06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BangunanKantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor yang disediakan (Paket]	100%	Mendukung
2	18	1	06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	125%	Mendukung
2	18	1	06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan[Paket]	100	Mendukung
2	18	1	06	05				Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	100%	Mendukung
2	18	1	06	06				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	100%	Mendukung

2	18	1	06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	149%	Mendukung
2	18	1	06	10				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	100%	Mendukung
2	18	1	07					Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	100%	Mendukung
2	18	1	07	05				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	100%	Mendukung
2	18	1	07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan [unit]	100%	Mendukung
2	18	1	08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	100%	Mendukung
2	18	1	08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	100%	Mendukung
2	18	1	08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	100%	Mendukung
2	18	1	08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	100%	Mendukung
2	18	1	08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	100%	Mendukung
2	18	1	09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	100%	Mendukung

2	18	1	09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	100%	Mendukung
2	18	1	09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	100%	Mendukung
2	18	1	09	05				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	100%	Mendukung
2	18	1	09	07				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	100%	Mendukung
2	18	1	09	09				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	100%	Mendukung
2	18	1	09	10				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	100%	Mendukung

Tujuan strategis, Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator tujuan Jumlah realisasi investasi, didukung oleh sasaran strategis, Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator Jumlah PMA/PMDN (investor) serta sasaran penunjang, Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Predikat kinerja SAKIP Perangkat Daerah

Pada tujuan strategis, dengan indikator Jumlah realisasi investasi capaian kinerja sebesar 143%, sedangkan sasaran strategis dengan indikator Jumlah PMA/PMDN (investor) capaian kinerja sebesar 367%, dengan Kategori Sangat Baik. Sasaran Strategis ini didukung oleh sejumlah Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yaitu:

Tabel. 3.13
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang Mendukung
Tujuan dan Sasaran Strategis

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Realisasi (%)
18.2	PROGRAM PENGEMBANGANIKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]	100%
18.2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	jumlah penyusunan peta potensiinvestasi (dokumen)	100%
18.2.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi danPeluang Usaha Kabupaten/Kota (dokumen)	100%
18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/ besar [%]	135%
18.3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadiKewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah even promosi (kali)	100%
18.3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal DaerahKabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (dokumen)	100%
18.4	PROGRAM PELAYANANPENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan MasyarakatBidang Perizinan dan Non perizinan [poin]	107%
18.4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan DaerahKabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan (%)	100%
18.4.1.5	Koordinasi dan SinkronisasiPenetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah[Kegiatan Usaha]	100%
18.4.1.6	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan TerpaduPerizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]	137%

18.4.1.7	Penyediaan Layanan Konsultasidan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan Non Perizinan [Orang]	111%
18.4.1.8	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (kegiatan usaha)	131%
18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaku usahayang menyampaikan LKPM [%]	540%
18.5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan DaerahKabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100%
18.5.1.2	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100%
18.5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	132%
18.6	PROGRAM PENGELOLAANDATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yangtersusun dengan baik [%]	100%
18.6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan[%]	100%
18.6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha TerintegrasiSecara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	200%

Dari program/ kegiatan/ subkegiatan tersebut capaian kinerjanya semuanya 100% atau lebih. Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis adalah:

1. Pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dimaksudkan untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, nyaman untuk berinvestasi dan memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Peningkatan realisasi investasi didukung oleh iklim yang kondusif bagi penanaman modal. Iklim yang kondusif dapat terjaga dengan adanya perangkat regulasi bidang penanaman modal antara

lain, kebijakan dalam bidang penyediaan informasi RTRW maupun RDTR. Dengan penyediaan informasi tersebut serta kemudahan dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, mampu meningkatnya realisasi investasi dan jumlah PMA/PMDN.

2. Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal yang memuat salah satu program unggulan peningkatan UMKM telah memacu peningkatan jumlah PMDN terutama pada sektor UMKM, selain tentunya juga mampu menarik calon investor skala besar walaupun dengan jumlah investor relatif kecil. Namun demikian hal ini mampu memacu pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Sragen. Salah satu kegiatan promosi penanaman yang dilakukan melalui CJIBF telah memacu peningkatan jumlah kepeminatan realisasi investasi pada skala menengah besar. Hal ini terbukti dengan jumlah realisasi kepeminatan penanaman modal meningkat menjadi 135% dibanding realisasi kepeminatan penanaman modal tahun 2023 sebesar 41%.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal juga sangat berperan dalam peningkatan realisasi penanaman modal. Pelayanan yang baik serta kemudahan dalam perizinan berusaha, maka diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penanaman modal. Pada program ini menitik beratkan pada pelayanan pelayanan perizinan berusaha dan nonberusaha. Kegiatan pada program ini dilakukan melalui pelayanan perizinan secara elektronik terintegrasi melalui OSS RBA. Selain itu adanya kegiatan pelatihan dan fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha utamanya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan pelatihan dan fasilitasi perizinan ini diharapkan mampu menumbuhkan sektor kegiatan usaha mikro dan kecil yang diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan. Pelayanan yang baik serta kemudahan dalam perizinan berusaha, maka berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penanaman modal.
4. Program Pengendalian Penanaman Modal dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan investasi yang ada di Kabupaten Sragen tetap berjalan, serta memastikan kegiatan investasi tetap mematuhi atas ketentuan terhadap aturan bidang investasi. Kegiatan ini meliputi Bimbingan teknis bagi pelaku usaha, pendampingan penyusunan LKPM, penyelesaian masalah atas hambatan yang terjadi pada pelaku usaha, serta pelaksanaan pengawasan penanaman modal. Hal ini sangat berpengaruh dan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pencatatan realisasi investasi, baik dari sisi potensi investasi dan investasi riil.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal menjadi instrumen pendukung lainnya dalam pengelolaan dan penyediaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal. Hal ini guna mendukung penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah maupun sebagai bahan pertimbangan bagi calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sragen.

Sasaran Penunjang Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja sebesar 108%, dengan Kategori Sangat Baik. Sasaran ini didukung oleh sejumlah program/ kegiatan/ Subkegiatan yaitu:

Tabel. 3.14
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Yang Mendukung Sasaran Penunjang

Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]	100%
2	18	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	125%
2	18	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150%
2	18	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%
2	18	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkatdaerah [bulan]	100%
2	18	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	92%
2	18	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [dokumen]	100%
2	18	1	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan [Orang]	33%
2	18	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	100%

2	18	1	06		Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkatdaerah [bulan]	100%
2	18	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor yang disediakan (Paket]	100%
2	18	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan [Paket]	125%
2	18	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan[Paket]	100
2	18	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan [paket]	100%
2	18	1	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan [Dokumen]	100%
2	18	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	149%
2	18	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	100%
2	18	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	100%
2	18	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	100%
2	18	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan [unit]	100%
2	18	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaanjasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	100%
2	18	1	08	01	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	100%
2	18	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	100%
2	18	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	100%
2	18	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	100%
2	18	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	100%

2	18	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	100%
2	18	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	100%
2	18	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	100%
2	18	1	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	100%
2	18	1	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	100%
2	18	1	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	100%

Semua program/kegiatan/subkegiatan tersebut capaian kinerja 100% atau lebih, kecuali;

1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (92%), jumlah PNS berkurang dikarenakan pensiun dan adanya mutasi PNS.
2. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (33%), bahwa dari target 3 (tiga) orang yang dikirim mengikuti diklat hanya 1 (satu) orang yang dapat mengikuti diklat. Upaya pendaftaran diklat telah dilakukan namun tidak memperoleh panggilan diklat dari instansi yang dituju.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran penunjang adalah:

1. Implementasi instrument pendukung dalam pencapaian SAKIP dari sistem/ aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, seperti sirenja, SIPD, e-kinerja, e-monevrkpd serta e-sakip yang berfungsi untuk membantu pekerjaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja SKPD.
2. Selain menggunakan aplikasi tersebut di atas, DPMPTSP Kabupaten Sragen juga memanfaatkan aplikasi dalam meningkatkan kinerja dan untuk memudahkan dalam pelayanan sesuai tugas pokok urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, antara lain OSS RBA, SIPIONER, SiPELANGI, PASTI-OL, SIAP serta Layanan Bergerak.

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja atas Rencana Aksi dan Rencana Kerja Tahunan yang dilakukan setiap tri wulan, untuk memastikan tercapainya target kinerja.

E. REALISASI ANGGARAN

Belanja yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Belanja

   Belanja yang direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.860.892.024 yang meliputi;

   a. Belanja Operasi Rp. 6.436.197.718,00
      - Belanja Pegawai Rp. 3.478.501.218,00
      - Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.957.696.500,00
   b. Belanja Modal Rp. 424.694.306,00
      - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 251.875.000,00
      - Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 172.819.306,00

   Realisasi Belanja yang dapat diwujudkan adalah sebesar Rp. 6.414.963.695 (93,50%).

   Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi Belanja yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Sragen adalah sebesar 93,50%.

2. Realisasi Anggaran Belanja yang mendukung secara langsung IKU

   Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen terdapat 5 program yang mendukung secara langsung Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yaitu:

   a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

      Progam tersebut direncanakan tahun 2024 sebesar Rp. 120.000.000,00. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 119.633.100,00. Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar 99,69%.

   b. Program Promosi Penanaman Modal

      Progam tersebut direncanakan tahun 2024 sebesar Rp. 128.356.500,00.

Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 125.184.487,00. Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar 97,53%.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Progam tersebut direncanakan tahun 2024 sebesar Rp. 381.247.000,00. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 362.076.093,00. Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar 94,97%.

d. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Progam tersebut direncanakan tahun 2024 sebesar Rp. 582.619.000,00. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 580.174.500,00. Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar 99,58%.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Progam tersebut direncanakan tahun 2024 sebesar Rp. 32.000.000,00. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 31.000.000,- Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar 96,88%.

3. Realisasi Anggaran Belanja yang tidak mendukung secara langsung IKU

Pada tahun 2024, terdapat program yang tidak mendukung secara langsung IKU PD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Progam tersebut direncanakan tahun 2023 sebesar Rp. 5.616.669.524,00. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 5.196.895.515,00. Berdasarkan perbandingan antara rencana dan realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa capaian anggaran yang tidak mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar 92,53%

Tabel. 3.15

Realisasi APBD DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 202

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Belanja Operasi	Belanja Modal	Sumber Dana	Realisasi	%	Sisa
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.860.892.024	6.436.197.718	424.694.306		6.414.963.695	93,50%	445.928.329
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.616.669.524	5.191.975.218	424.694.306	DAU	5.196.895.515	92,53%	419.774.009
2.18.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.338.000	4.338.000	0	DAU	3.203.000	73,84%	1.135.000
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.224.000	2.224.000	0	DAU	1.514.000	68,08%	710.000
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.114.000	2.114.000	0	DAU	1.689.000	79,90%	425.000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.478.501.218	3.478.501.218	0	DAU	3.168.884.656	91,10%	309.616.562
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.478.501.218	3.478.501.218	0	DAU	3.168.884.656	91,10%	309.616.562
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.538.000	104.538.000	0	DAU	85.687.510	81,97%	18.850.490
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.118.000	10.118.000	0	DAU	3.915.010	38,69%	6.202.990
2.18.01.2.05.00011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	94.420.000	94.420.000	0	DAU	81.772.500	86,61%	12.647.500
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	607.279.000	424.973.000	182.306.000	DAU	599.639.602	98,74%	7.639.398
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.570.000	35.570.000	0	DAU	35.507.500	99,82%	62.500
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	276.654.000	94.348.000	182.306.000	DAU	275.298.000	99,51%	1.356.000
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.180.000	75.180.000	0	DAU	70.737.500	94,09%	4.442.500
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.375.000	91.375.000	0	DAU	90.006.000	98,50%	1.369.000
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	4.000.000	0	DAU	3.600.000	90,00%	400.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.500.000	111.500.000	0	DAU	111.490.602	99,99%	9.398

2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.000.000	13.000.000	0	DAU	13.000.000	100,00%	0
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.297.306	0	230.297.306	DAU	228.125.000	99,06%	2.172.306
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	53.340.000	0	53.340.000	DAU	52.685.000	98,77%	655.000
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.957.306	0	176.957.306	DAU	175.440.000	99,14%	1.517.306
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	916.712.000	904.621.000	12.091.000	DAU	873.612.875	95,30%	43.099.125
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.994.000	4.994.000	0	DAU	4.994.000	100,00%	0
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	466.936.000	466.936.000		DAU	430.424.873	92,18%	36.511.127
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.256.000	66.395.000	5.861.000	DAU	70.812.000	98,00%	1.444.000
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.526.000	366.296.000	6.230.000	DAU	367.382.002	98,62%	5.143.998
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.004.000	275.004.000	0	DAU	237.742.872	86,45%	37.261.128
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.681.000	57.681.000	0	DAU	55.285.115	95,85%	2.395.885
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.228.000	102.228.000	0	DAU	78.930.757	77,21%	23.297.243
2.18.01.2.09.0003	Pemeliharaan Mebel	16.011.000	16.011.000	0	DAU	13.102.000	81,83%	2.909.000
2.18.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.760.000	15.760.000	0	DAU	12.275.000	77,89%	3.485.000
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.720.000	43.720.000	0	DAU	41.826.000	95,67%	1.894.000
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.604.000	39.604.000	0	DAU	36.324.000	91,72%	3.280.000
2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	120.000.000	120.000.000	0	DAU	119.633.100	99,69%	366.900
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	120.000.000	120.000.000	0	DAU	119.633.100	99,69%	366.900
2.18.02.2.02.0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	120.000.000	120.000.000	0	DAU	119.633.100	99,69%	366.900
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	128.356.500	128.356.500	0	DAU	125.184.487	97,53%	3.172.013
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	128.356.500	128.356.500	0	DAU	125.184.487	97,53%	3.172.013

2.18.01.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	128.356.500	128.356.500	0	DAU	125.184.487	97,53%	3.172.013
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	381.247.000	381.247.000	0	DAU	362.076.093	94,97%	19.170.907
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	381.247.000	381.247.000	0	DAU	362.076.093	94,97%	19.170.907
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	70.000.000	70.000.000		DAU	69.747.400	99,64%	252.600
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	113.264.000	113.264.000	0	DAU	98.613.693	87,07%	14.650.307
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis risiko	45.000.000	45.000.000	0	DAU	44.450.000	98,78%	550.000
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	152.983.000	152.983.000	0	DAU	149.265.000	97,57%	3.718.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	582.619.000	582.619.000	0	DAK NF	580.174.500	99,58%	2.444.500
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	582.619.000	582.619.000	0	DAK NF	580.174.500	99,58%	2.444.500
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	407.834.000	407.834.000	0	DAK NF	405.589.500	99,45%	2.244.500
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	174.785.000	174.785.000	0	DAK NF	174.585.000	99,89%	200.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	32.000.000	32.000.000	0	DAU	31.000.000	96,88%	1.000.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.000.000	32.000.000	0	DAU	31.000.000	96,88%	1.000.000
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	32.000.000	32.000.000	0	DAU	31.000.000	96,88%	1.000.000

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/ sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Tingkat efisiensi penggunaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan sektor Penanaman Modal, terjadi pada beberapa pencapaian outcome, yang secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16

Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No		Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis	KINERJA TAHUN 2024			ANGGARAN TAHUN 2024			Tingkat Capaian (tingkat efisiensi) : 100% - (kolom 9))
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi (trilyun rupiah)	1,60	2,30	144%	6.860.892.024	6.414.963.695	93,50%	6,50%
1	1	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN (investor)	3.000	10.995	367%	1.244.222.500	1.218.068.180	97,90%	2,10%
1	2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja AKIP Perangkat Daerah	70,40 (BB)	76,15 (BB)	108%	5.616.669.524	5.196.895.515	92,53%	7,47%

Secara umum efisiensi sumberdaya dapat dihitung dengan rumus :

= 100% - (realisasi anggaran/target anggaran x 100%)

= 100% - (6.414.963.695/6.860.892.024x100%)

= 100% - 93,50%

= 6,50%

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017, maka kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen masih berada pada rentang nilai -20% sampai 20% dan dikategorikan kinerja yang efektif dan efisien.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan serangkaian prosedur pengelolaan anggaran hingga realisasinya dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas/ pertanggungjawaban atas dana yang telah dianggarkan pada perangkat daerah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. Hal tersebut adalah merupakan data yang diolah untuk dijadikan suatu informasi guna pengambilan keputusan dan juga sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan juga sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tahun berikutnya.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen yang telah diraih selama tahun 2024 serta permasalahan yang sudah dihadapi, diharapkan dapat menjadi suatu acuan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk tahun yang akan datang.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada Bab III, maka dapat disampaikan bahwa DPMPTSP Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dicapai dengan kategori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Tujuan 1: Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tercapai 142 % atau dengan kategori Sangat Baik;
2. Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tercapai sebesar 367% atau dengan kategori Sangat Baik;
3. Capaian kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, tercapai sebesar 108 % atau dengan kategori Sangat Baik

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen pada tahun 2024 optimal, yang disebabkan target indikator kinerja tujuan dan sasaran

strategis telah tercapai melebihi target.

Sedangkan dari sisi belanja, dengan anggaran belanja sebesar Rp 6.860.892.024,00 pada akhir tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp 6.414.963.695,00 (93,50 %) atau terdapat Sisa Lebih Pagu Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 445.928.329,00 (6,50 %). Adapun SiLPA disebabkan dari belanja gaji dan tunjangan ASN, karena adanya mutasi PNS dan pensiun. Selain itu adanya peningkatan pengendalian dalam proses pengadaan barang/ jasa serta adanya upaya untuk melakukan efisiensi sumber daya berupa;

1. Peningkatan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan perencanaan kegiatan guna menghindari adanya duplikasi kegiatan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan layanan konsultasi dan informasi bagi pengguna layanan.
3. Pelibatan asosiasi profesi, dunia usaha, dalam proses konsultasi publik , sehingga memastikan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
4. Pendampingan dalam penyusunan LKPM secara berkala guna memastikan pelaku usaha dapat mengimplementasikan periode berikutnya.
5. Pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya air, listrik, telepon maupun internet dalam proses aktivitas kerja untuk memastikan tidak ada sumber daya yang terbuang.
6. Pemeliharaan terhadap sarana prasarana kantor secara berkala untuk memperpanjang usia pakai peralatan.
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka koordinasi dengan pihak terkait alat tulis kantor serta menuju konsep paperless.

Sementara permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/ kegiatan antara lain :

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia;
2. Rendahnya kajian potensi penanaman modal yang dapat ditawarkan kepada calon investor
3. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan ketentuan bidang penanaman modal.

B. SARAN

Berdasarkan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2024, terdapat

beberapa rencana strategis yang dirancang untuk mencapai target kinerja pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

a. Penguatan iklim investasi yang kondusif dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman, melalui perangkat regulasi yang mendukung implementasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
b. Peningkatan kualitas promosi melalui forum investasi dan penyebarluasan informasi peluang potensi sektor investasi yang layak ditawarkan kepada calon investor.
c. Peningkatan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan dengan melakukan review atas standar pelayanan maupun standar pelayanan prosedur.
d. Peningkatan pendampingan penyusunan LKPM agar lebih optimal dalam pencapaian realisasi investasi.
e. Peningkatan pengelolaan data dan informasi dalam mewujudkan data dan informasi yang berkualitas.
f. Mendorong implementasi *reward and punishment* dalam proses pembinaan pegawai, pegawai didorong untuk mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Jabatan : BUPATI SRAGEN

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 02 Januari 2024

PIHAK II	PIHAK I
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI	**DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	1,6 trilyun
	[-] Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN	3.000 investor
	[-] Meningkatnya akuntabilitaskinerja perangkat daerah	Predikat KInerja SAKIP Perangkat Daerah	70,30 poin

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	5.629.365.719	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	120.000.000	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	131.500.000	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	418.034.000	DAU
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	582.619.000	DAK NON FISIK
6	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	DAU

Sragen, 02 Januari 2024

PIHAK II	PIHAK I
	
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI	**DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id

SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 02 Januari 2024

PIHAK II	PIHAK I
DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.	**YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	3 Dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaporan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan
3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan
4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Laporan
6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.938.000	DAU
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.531.127.719	DAU
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.196.000	DAU
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	628.634.000	DAU
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207.948.241	DAU
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	914.714.000	DAU
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.807.759	DAU

Sragen, 02 Januari 2024

PIHAK II	PIHAK I
DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.	**YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id

SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 02 Januari 2024

PIHAK II	PIHAK I
YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.	**Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
2	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan
3	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang
4	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
5	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket
6	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
7	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
8	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
9	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan
10	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen
11	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen
12	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket
13	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit

14	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
15	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
16	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan
17	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit
19	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	16 Unit
20	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	57 Unit
21	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit
22	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
23	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit
24	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
25	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.524.000	DAU
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.414.000	DAU

3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.531.127.719	DAU
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.596.000	DAU
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	42.600.000	DAU
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.570.000	DAU
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.455.000	DAU
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.630.000	DAU
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	96.875.000	DAU
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	DAU
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	DAU
12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.000.000	DAU
13	Dukungan Pelaksanaan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	39.104.000	DAU
14	Pengadaan Mebel	53.340.000	DAU
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	154.608.241	DAU
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.994.000	DAU
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	DAU
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.692.000	DAU
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	381.028.000	DAU
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.470.000	DAU
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.840.000	DAU
22	Pemeliharaan Mebel	10.461.000	DAU
23	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.260.000	DAU
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.720.000	DAU

25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.056.759	DAU

Sragen, 02 Januari 2024

PIHAK II	PIHAK I
YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos.,M.M.	**Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id

SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Jabatan : Bupati Sragen

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 02 September 2024

PIHAK II	PIHAK I
dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI	**DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	1,60 trilyun rupiah
	[-] Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN	3.000 investor
	[-] Meningkatnya predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	70,30 (BB) poin

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.345.459.719	Dana Alokasi Umum (DAU)
2	Program Pengembangan Penanaman Modal	120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3	Program Promosi Penanaman Modal	131.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	418.034.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penananaman Modal	582.619.000	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF)
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Sragen, 02 September 2024

PIHAK II	PIHAK I
dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI	**DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 02 September 2024

PIHAK II	PIHAK I
DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.	**ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	3 dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaporan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan
3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 laporan
4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Pelaporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 laporan
6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.338.000	DAU
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.478.501.218	DAU
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.538.000	DAU
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	607.279.000	DAU
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.297.306	DAU
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	916.712.000	DAU
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.004.000	DAU

Sragen, 02 September 2024

PIHAK II	PIHAK I
DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.	**ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Website : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 02 September 2024

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.**

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
2	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan
3	terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang
4	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang
5	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket
6	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket
7	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket
8	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket
9	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen
10	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan
11	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 dokumen
12	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket
13	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit

14	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan
15	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan
16	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan
17	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 unit
19	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	16 unit
20	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	57 unit
21	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit
22	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
23	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit
24	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.224.000	DAU
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.114.000	DAU
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.478.501.218	DAU
4	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.118.000	DAU

5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	94.420.000	DAU
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.570.000	DAU
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	276.654.000	DAU
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.180.000	DAU
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.375.000	DAU
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	DAU
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.500.000	DAU
12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.000.000	DAU
13	Pengadaan Mebel	53.340.000	DAU
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.957.306	DAU
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.994.000	DAU
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	466.936.000	DAU
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.256.000	DAU
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.526.000	DAU
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.681.000	DAU
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.228.000	DAU
21	Pemeliharaan Mebel	16.011.000	DAU
22	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.760.000	DAU
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.720.000	DAU
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.604.000	DAU

Sragen, 02 September 2024

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Laman : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Pos-el : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : dr.KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Jabatan : BUPATI SRAGEN

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 06 Januari 2025

PIHAK II	PIHAK I
dr.KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI	**DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase peningkatan realisasi investasi	4,26 %
	[-] Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	jumlah PMA/ PMDN	10.998 Investor
	[-] Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	76,15 (BB) predikat
	[-] Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan nonperizinan	Persentase peningkatan IKM bidang perizinan dan nonperizinan	3,14 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.000.000	DAU
2	Program Promosi Penanaman Modal	137.534.000	DAU
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	482.359.500	DAU
4	Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	32.000.000	DAU
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	55.000.000	DAU
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.949.254.177	DAU

Sragen, 06 Januari 2025

PIHAK II

dr.KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIHAK I

DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Laman : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Pos-el : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 02 Januari 2025

PIHAK II	PIHAK I
DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.	**ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.763.000	DAU
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.895.270.179	DAU
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.528.000	DAU
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	520.899.600	DAU
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.947.000	DAU
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.008.121.398	DAU
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.725.000	DAU

Sragen, 02 Januari 2025

PIHAK II	PIHAK I
DWI AGUS PRASETYO, S.STP.,M.Si.	**ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Laman : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Pos-el : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 02 Januari 2025

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya administrasi kepegawaian yang akuntabel	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 laporan
2	Terpenuhinya Kebutuhan Adminstrasi umum Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan
3	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai kebutuhan	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah (laporan)	3 laporan
4	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk kelancaran operasional kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan
5	Terlaksananya pemeliharaan BMD agar tetap berfungsi baik	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	4 laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.528.000	DAU
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000	DAU
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	39.936.000	DAU
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.608.600	DAU
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.415.000	DAU
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	89.290.000	DAU
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	DAU
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	DAU
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.650.000	DAU
10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	DAU
11	Pengadaan Mebel	26.742.000	DAU

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.205.000	DAU
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	DAU
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	507.925.022	DAU
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.161.000	DAU
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417.035.376	DAU
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.520.000	DAU
18	Pemeliharaan Mebel	13.582.000	DAU
19	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.260.000	DAU
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.765.000	DAU
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.598.000	DAU

Sragen, 02 Januari 2025

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.**

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen Telp/Fax (0271) 892348 / (0271) 894433
Laman : http://www.dpmptsp.sragenkab.go.id Pos-el : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 02 Januari 2025

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya administrasi kepegawaian yang akuntabel	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 laporan
2	Terpenuhinya Kebutuhan Adminstrasi umum Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan
3	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai kebutuhan	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah (laporan)	3 laporan
4	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk kelancaran operasional kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan
5	Terlaksananya pemeliharaan BMD agar tetap berfungsi baik	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	4 laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.528.000	DAU
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000	DAU
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	39.936.000	DAU
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.608.600	DAU
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.415.000	DAU
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	89.290.000	DAU
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	DAU
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	DAU
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.650.000	DAU
10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	DAU
11	Pengadaan Mebel	26.742.000	DAU

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.205.000	DAU
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	DAU
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	507.925.022	DAU
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.161.000	DAU
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417.035.376	DAU
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.520.000	DAU
18	Pemeliharaan Mebel	13.582.000	DAU
19	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.260.000	DAU
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.765.000	DAU
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.598.000	DAU

Sragen, 02 Januari 2025

PIHAK II	PIHAK I
ILHAM KURNIAWAN, S.T.,M.M.	**Dra. EKOWATI YULI WIDYANINGSIH, M.Si.**

PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SRAGEN
ASKARA BUMI SUKOWATI
NYAWIJI MELAYANI BUMI SUKOWATI

RENCANA AKSI
TAHUN 2024



DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

RENCANA AKSI
TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR ISI

		Hal
HALAMAN JUDUL		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
1	Latar Belakang	1
2	Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi	2
3	Maksud dan Tujuan	4
4	Landasan Hukum	4
BAB II.	RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA	6
1	Ikhtisar perjanjian Kinerja Tahun 2024	6
2	Rencana Aksi Tahun 2024	11
BAB III.	PENUTUP	16

BAB I
PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG

Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat, sehingga kualitas penyusunan Rencana Aksi akan menentukan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu, dan Renstra yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Kerja Tahunan, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Tahunan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;

c. Penyusunan Rencana Aksi bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rencana Aksi dengan dokumen RKPD dan Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Aksi merupakan penjabaran dana dan hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra dan RKPD. Rencana Aksi merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, dasar penyusunan RKA-DPA dan RAPBD.

2) TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

a. Tugas

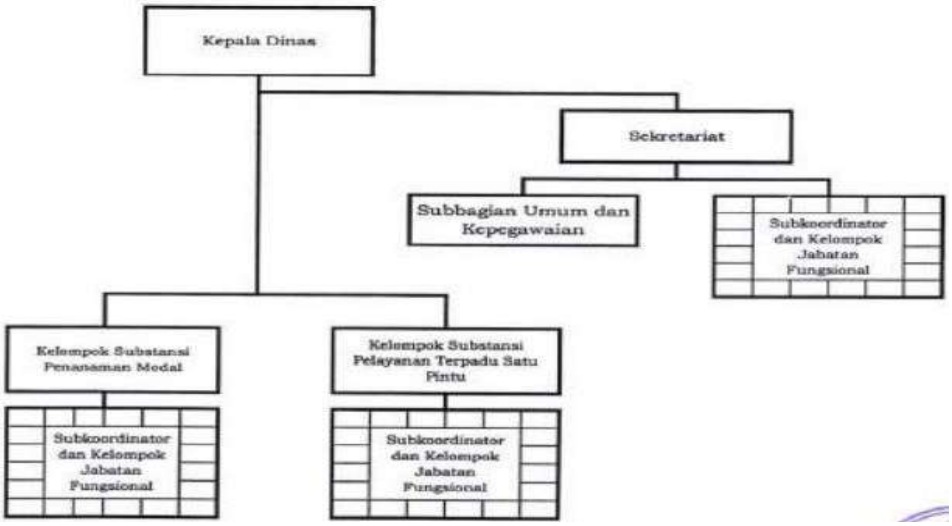
1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

c. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



d. Sumber Daya Manusia

TABEL 1.1
JUMLAH ASN BERDASAR GOLONGAN

Golongan / Ruang	Esselon				Staf	Jumlah
	II	III	IV			
Golongan IV/c	1					
Golongan IV/b		1		2		
Golongan IV/a			1			
Jumlah Golongan IV	1	1	1	2	0	5
Golongan III/d				8	6	
Golongan III/c				1		
Golongan III/b						
Golongan III/a					3	
Jumlah Golongan III	0	0	0	9	9	18
Golongan II/d						
Golongan II/c						
Golongan II/b						
Golongan II/a					1	
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	1	1
Golongan I/d						
Golongan I/c						
Golongan I/b						
Golongan I/a						

Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0
Total	1	1	1	11	11	24

Sumber Data : DPMPTSP Tahun 2023

TABEL 1.2

JUMLAH ASN BERDASAR PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1	DOKTOR (S3)	-
2	PASCASARJANA (S2)	5
3	SARJANA (S1)	18
4	SARJANA MUDA (D3)	1
5	SLTA / SMEA / MA	0
6	SLTP	0
7	SD	0
JUMLAH		**24**

Sumber data : DPMPTSP Tahun 2023

3). MAKSUD DAN TUJUAN

a) Maksud dari Rencana Aksi Tahun 2024 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

b) Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana aksi ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

4). LANDASAN HUKUM

a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan ;

d) Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

BAB II

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

1) IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja terhadap target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen berdasarkan tujuan/ sasaran strategis jangka menengah serta dengan telah disahkannya Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Maka Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)	TARGET					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**TUJUAN** : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)	**Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah . **Formulasi Pengukuran:** Nilai investasi dalam tahun berjalan. **Tipe Perhitungan:** Komulatif **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	8,00
1.1	**SASARAN** : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	**Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam peningkatan iklim usaha yang berdaya saing dan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha, yang mendukung peningkatan jumlah PMA/ PMDN (investor). **Formulasi Pengukuran:** Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/ investor) dalam tahun berjalan. **Tipe Perhitungan:** Komulatif **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal	1.250	1.313	1.378	1.447	1.519	6.907

Dari indikator kinerja utama tersebut diperjanjikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dengan Bupati Sragen sebagai pemberi mandat dalam bentuk Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	1,600	trilyun rupiah
2	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	3.000	investor
3	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,30)	predikat

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	5.629.365.719	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	120.000.000	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	131.500.000	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	418.034.000	DAU
5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan	582.619.000	DAK NON FISIK
6	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.000.000	DAU
	JUMLAH	6.913.518.719	

Untuk dapat merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada rencana kinerja tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, maka terdapat 5 (lima) Program yang mendukung sasaran strategis/IKU dan 1 (satu) Program yang mendukung sasaran penunjang/ kinerja penunjang.

a. Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung IKU antara lain:

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Keterangan
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**40%**	
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]	1	
18.02.02.01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [Dokumen]	1	
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**20%**	
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	2	
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	2	
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**84,00**	
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100%	
18.04.01.01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha elalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]	1.250	
18.04.01.02	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan , Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [Kegiatan Usaha]	500	
18.04.01.03	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [Orang]	80	
18.04.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	150	
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**10%**	

18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100%	
18.05.01.01	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	150	
18.05.01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal [Pelaku Usaha]	150	
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**50%**	
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	50%	
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	1	

b. Program yang mendukung kinerja penunjang:

Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Keterangan
18	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]**	100	
18	01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (dokumen)	3	
18	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	
18	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	1	
18	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	12	
18	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	25	
18	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [dokumen]	2	

18	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	
18	01	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	
18	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	12	
18	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	4	
18	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	6	
18	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	4	
18	01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	4	
18	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	1	
18	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	25	
18	01	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	1	
18	01	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	1	
18	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	2	
18	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	2	
18	01	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan [unit]	4	
18	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	12	
18	01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	4	
18	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	4	

18	01	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	4	
18	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	4	
18	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	2	
18	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	7	
18	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	8	
18	01	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	18	
18	01	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3	
18	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	
18	01	09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	28	

2) RENCANA AKSI TAHUN 2024

Secara rinci Rencana Aksi Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

NO	TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	trilyun rupiah	1,600	6.913.518.719	0,4	0,8	1,2	1,55	Kepala Dinas
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	investor	1.378	6.913.518.719	300	600	1.000	1.378	Kepala Dinas

18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun**	**%**	40	120.000.000	0	0	20	40	Kepala Dinas
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi	dokumen	1	120.000.000	0	0	1	1	Koord Penanaman Modal
18.02.02.01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	dokumen	1	120.000.000	0	0	1	1	
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/besar**	**%**	20	131.500.000	2	8	15	20	Kepala Dinas
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah even promosi	kali	2	131.500.000	0	0	1	2	Koord Penanaman Modal
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	131.500.000	0	0	1	2	Tim Kerja Promosi
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan**	Poin	84,00	418.034.000	84,00	84,00	84,00	84,00	Kepala Dinas
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	%	100	418.034.000	100	100	100	100	Koord PTSP
18.04.01.01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1.250	113.264.000	250	500	800	1.250	
18.04.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Orang	80	45.000.000	20	40	60	80	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.04.01.03	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan , Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kegiatan Usaha	500	189.770.000	125	250	375	500	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.04.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	150	97.077.000	0	90	150	150	Tim Kerja Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**%**	10	582.619.000	2	5	7	10	Kepala Dinas
18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	**%**	100	582.619.000	100	100	100	100	Koord Penanaman Modal
18.05.01.01	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha Penanaman Modal	Kegiatan USaha	210	407.834.000	35	140	210	210	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan
18.05.01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	150	174.785.000	35	70	105	150	Tim Kerja Pengendalian dan PElaksanaan
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik**	%	50	32.000.000	0	0	0	50	Kepala Dinas
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/ nonperizinan	%	50	32.000.000	0	0	0	50	Koord PTSP
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Dokumen	1	32.000.000	0	0	0	1	Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	predikat	70,30	5.364.340.708	0	70,30	70,30	70,30	Kepala Dinas
18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah**	%	100	5.629.365.719	25	50	75	100	Kepala Dinas
18.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	3	6.938.000	1	2	3	3	Sekretaris
18.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.524.000	1	2	2	2	Tim Kerja PEP
18.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1	3.414.000	1	1	1	1	Tim Kerja PEP
18.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	3.531.127.719	3	6	9	12	Sekretaris

18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25	3.531.127.719	25	25	25	25	Tim Kerja Keuangan
18.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	dokumen	2	58.196.000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	dokumen	4	15.596.000	0	2	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	40	42.600.000	0	40	40	40	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	628.634.000	3	6	9	12	Sekretaris
18.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	35.570.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6	268.455.000	1	2	3	6	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	69.630.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	96.875.000	1	1	2	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	6.000.000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	25	100.000.000	6	12	18	25	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	13.000.000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SistemPemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	39.104.000	0	0	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	laporan	2	207.948.241	1	1	2	2	Sekretaris
18.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	53.340.000	3	4	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	4	154.608.241	3	5	5	5	Kasubag Umum dan Kepegawaian

18.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	914.714.000	3	6	9	12	Sekretaris
18.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	4.994.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	450.000.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	78.682.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	381.028.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	laporan	2	281.807.759	3	6	9	12	Sekretaris
18.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	59.470.000	3	3	3	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	106.840.000	12	12	16	16	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	57	10.461.000	12	24	40	57	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	3	18.260.000	1	2	3	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	43.720.000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dire habilitasi	unit	51	43.056.759	0	15	30	51	Kasubag Umum dan Kepegawaian

BAB III
PENUTUP

Rencana Aksi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Rencana Aksi disusun dengan mempedomani Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, yang memuat kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Aksi Tahun Anggaran 2024 ini, berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024, sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan.

Rencana Aksi ini secara umum menguraikan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub-kegiatan serta indikator dan target kinerja. Maka dengan mempedomani Rencana Kerja Tahunan ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD, diharapkan tugas fungsi dinas dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja prangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati Sragen. Rencana Aksi ini akan dapat tercapai dengan komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan staf yang disertai pengabdian dan loyalitas yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.

Demikianlah dokumen Rencana Aksi untuk periode tahun 2024 ini yang disusun sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan.

Sragen, Pebruari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SRAGEN
ASKARA BUMI SUKOWATI
NYAWIJI MELAYANI BUMI SUKOWATI

PERUBAHAN RENCANA AKSI
TAHUN 2024



DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

PERUBAHAN RENCANA AKSI
TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR ISI

		Hal
HALAMAN JUDUL		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
1	Latar Belakang	1
2	Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi	2
3	Maksud dan Tujuan	4
4	Landasan Hukum	4
BAB II.	RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA	5
1	Ikhtisar perjanjian Kinerja Tahun 2024	5
2	Rencana Aksi Tahun 2024	10
BAB III.	PENUTUP	15

BAB I
PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG

Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat, sehingga kualitas penyusunan Rencana Aksi akan menentukan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu, dan Renstra yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Kerja Tahunan, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Tahunan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;

c. Penyusunan Rencana Aksi bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rencana Aksi dengan dokumen RKPD dan Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Aksi merupakan penjabaran dana dan hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra dan RKPD. Sehubungan dengan adanya Perubahan APBD Tahun 2024, maka Rencana Aksi yang telah disusun perlu dilakukan penyesuaian.

2) TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

a. Tugas

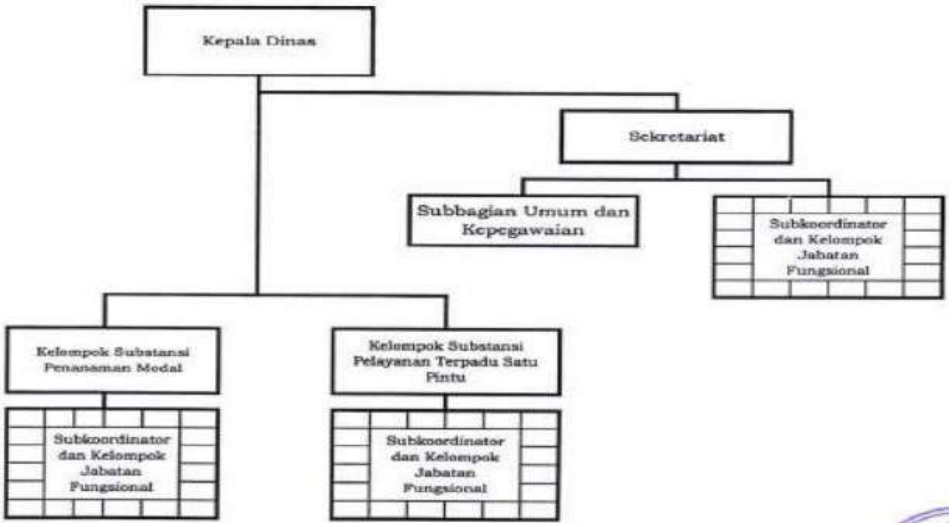
1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

c. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



d. Sumber Daya Manusia

TABEL 1.1
JUMLAH ASN BERDASAR GOLONGAN

Golongan / Ruang	Esselon				Staf	Jumlah
	II	III	IV			
Golongan IV/c	1					
Golongan IV/b		1		2		
Golongan IV/a			1			
Jumlah Golongan IV	1	1	1	2	0	5
Golongan III/d				6	6	
Golongan III/c				1		
Golongan III/b						
Golongan III/a					3	
Jumlah Golongan III	0	0	0	9	9	18
Golongan II/d						
Golongan II/c						
Golongan II/b						
Golongan II/a					1	
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	1	1
Golongan I/d						
Golongan I/c						
Golongan I/b						

Golongan I/a						
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0
Total	1	1	1	9	11	22

Sumber Data : DPMPTSP Tahun 2023

TABEL 1.2

JUMLAH ASN BERDASAR PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1	DOKTOR (S3)	-
2	PASCASARJANA (S2)	5
3	SARJANA (S1)	16
4	SARJANA MUDA (D3)	1
5	SLTA / SMEA / MA	0
6	SLTP	0
7	SD	0
JUMLAH		**22**

Sumber data : DPMPTSP Tahun 2024

BAB II

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

1) IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja terhadap target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen berdasarkan tujuan/ sasaran strategis jangka menengah serta dengan telah disahkannya Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Maka Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)	TARGET					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**TUJUAN** : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)	**Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah . **Formulasi Pengukuran:** Nilai investasi dalam tahun berjalan. **Tipe Perhitungan:** Komulatif **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	8,00
1.1	**SASARAN** : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	**Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam peningkatan iklim usaha yang berdaya saing dan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha, yang mendukung peningkatan jumlah PMA/ PMDN (investor). **Formulasi Pengukuran:** Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/ investor) dalam tahun berjalan. **Tipe Perhitungan:** Komulatif **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal	1.250	1.313	3.000	3.250	3.500	12.313

Dari indikator kinerja utama tersebut diperjanjikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dengan Bupati Sragen sebagai pemberi mandat dalam bentuk Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	1,600	trilyun rupiah
2	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	3.000	investor
3	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,30)	predikat

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	5.616.669.524	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	120.000.000	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	128.356.500	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	381.247.000	DAU
5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan	582.619.000	DAK NON FISIK
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	32.000.000	DAU
	JUMLAH	6.860.892.024	

Untuk dapat merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada rencana kinerja tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, maka terdapat 5 (lima) Program yang mendukung sasaran strategis/IKU dan 1 (satu) Program yang mendukung sasaran penunjang/ kinerja penunjang.

a. Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung IKU antara lain:

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Keterangan
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**40%**	
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]	1	
18.02.02.01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [Dokumen]	1	
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**20%**	
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	2	
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	2	
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**84,00**	
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100%	
18.04.01.01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha elalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]	1.250	
18.04.01.02	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan , Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [Kegiatan Usaha]	500	
18.04.01.03	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [Orang]	80	
18.04.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	150	
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**10%**	

18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100%	
18.05.01.01	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	150	
18.05.01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal [Pelaku Usaha]	150	
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**50%**	
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	50%	
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	1	

b. Program yang mendukung kinerja penunjang:

Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Keterangan
18	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]**	100	
18	01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (dokumen)	3	
18	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	
18	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	1	
18	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	12	
18	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	25	
18	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [dokumen]	2	
18	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	3	

				dan Fungsi	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
18	01	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	
18	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	12	
18	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	4	
18	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	8	
18	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	4	
18	01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	4	
18	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	1	
18	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	35	
18	01	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	1	
18	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	2	
18	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	2	
18	01	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan [unit]	3	
18	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	12	
18	01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	4	
18	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	4	
18	01	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	4	
18	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	4	

18	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	2	
18	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	3	
18	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	16	
18	01	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	100	
18	01	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3	
18	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	
18	01	09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	52	

2) RENCANA AKSI TAHUN 2024

Secara rinci Rencana Aksi Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

NO	TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	trilyun rupiah	1,600	6.860.892.024	0,4	0,8	1,2	1,60	Kepala Dinas
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	investor	3.000	6.860.892.024	750	1500	2250	3000	Kepala Dinas
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun**	**%**	40	120.000.000	0	0	20	40	Kepala Dinas
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi	dokumen	1	120.000.000	0	0	1	1	Koord Penanaman Modal
18.02.02.01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	dokumen	1	120.000.000	0	0	1	1	

18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/besar**	**%**	20	131.500.000	2	8	15	20	Kepala Dinas
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah even promosi	kali	2	131.500.000	0	0	1	2	Koord Penanaman Modal
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	131.500.000	0	0	1	2	Tim Kerja Promosi
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan**	Poin	84,00	418.034.000	84,00	84,00	84,00	84,00	Kepala Dinas
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	%	100	418.034.000	100	100	100	100	Koord PTSP
18.04.01.01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1.250	113.264.000	250	500	800	1.250	
18.04.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Orang	80	45.000.000	20	40	60	80	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.04.01.03	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan , Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kegiatan Usaha	500	189.770.000	125	250	375	500	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.04.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	150	97.077.000	0	90	150	150	Tim Kerja Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**%**	10	582.619.000	2	5	7	10	Kepala Dinas
18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	**%**	100	582.619.000	100	100	100	100	Koord Penanaman Modal
18.05.01.01	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha Penanaman Modal	Kegiatan USaha	210	407.834.000	35	140	210	210	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan

18.05.01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	150	174.785.000	35	70	105	150	Tim Kerja Pengendalian dan PElaksanaan
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik**	%	50	32.000.000	0	0	0	50	Kepala Dinas
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/ nonperizinan	%	50	32.000.000	0	0	0	50	Koord PTSP
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Dokumen	1	32.000.000	0	0	0	1	Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	predikat	70,30	5.364.340.708	0	70,30	70,30	70,30	Kepala Dinas
18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah**	%	100	5.629.365.719	25	50	75	100	Kepala Dinas
18.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	4	6.938.000	1	2	3	4	Sekretaris
18.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3.524.000	1	2	2	3	Tim Kerja PEP
18.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1	3.414.000	1	1	1	1	Tim Kerja PEP
18.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	3.531.127.719	3	6	9	12	Sekretaris
18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25	3.531.127.719	25	25	25	25	Tim Kerja Keuangan
18.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	dokumen	2	58.196.000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	dokumen	3	15.596.000	0	2	2	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian

18.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	40	42.600.000	0	40	40	40	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	628.634.000	3	6	9	12	Sekretaris
18.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	35.570.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	8	268.455.000	1	2	6	8	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	69.630.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	96.875.000	1	1	2	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	6.000.000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	35	100.000.000	6	12	18	35	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	13.000.000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SistemPemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	39.104.000	0	0	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	laporan	2	207.948.241	1	1	2	2	Sekretaris
18.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	53.340.000	2	2	2	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	3	154.608.241	1	2	2	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	914.714.000	3	6	9	12	Sekretaris
18.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	4.994.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	450.000.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian

18.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	78.682.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	381.028.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	laporan	2	281.807.759	3	6	9	12	Sekretaris
18.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	59.470.000	3	3	3	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	106.840.000	12	12	16	16	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	100	10.461.000	12	24	40	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	3	18.260.000	1	2	3	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	43.720.000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dire habilitasi	unit	51	43.056.759	0	15	30	51	Kasubag Umum dan Kepegawaian

BAB III
PENUTUP

Perubahan Rencana Aksi ini adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Rencana Aksi disusun dengan mempedomani Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, yang memuat kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024, sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan.

Rencana Aksi ini secara umum menguraikan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub-kegiatan serta indikator dan target kinerja. Maka dengan mempedomani Rencana Kerja Tahunan ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD, diharapkan tugas fungsi dinas dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja prangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati Sragen. Rencana Aksi ini akan dapat tercapai dengan komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan staf yang disertai pengabdian dan loyalitas yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.

Demikianlah dokumen Perubahan Rencana Aksi untuk periode tahun 2024 ini yang disusun sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan.

Sragen, September 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr.Soetomo No.5 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website : http://dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN-57213

LAPORAN MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Monitoring dan evaluasi merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring dan evaluasi ini merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan kinerja yang telah berlangsung di DPMPTSP Kabupaten Sragen sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2024 yang telah disusun.

Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada periode berikutnya.

2. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen bertujuan untuk menilai tingkat capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun pada awal Tahun Anggaran 2024. Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan di periode berikutnya pada tahun berjalan.

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2024 dan dilaksanakan pada periode Triwulan I Tahun 2024.

4. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2024, pada Triwulan I dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang riil atas pelaksanaan capaian kinerja dari rencana aksi tahunan yang telah disusun untuk Triwulan I Tahun 2024, yang memuat perkembangan progress/ kemajuan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana tugas masing-masing program, kegiatan, subkegiatan sampai dengan rincian aktivitas.

Hasil evaluasi ini selain sebagai dasar evaluasi atas capaian kinerja juga sekaligus dapat dijadikan untuk memberikan rekomendasi dalam menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

C. HASIL YANG DICAPAI

Rencana Aksi Tahun 2024 ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang pada tabel 1.

TABEL 1
RENCANA AKSI DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN
TRIWULAN I TAHUN 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN TRIWULAN I	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	Nilai investasi dalam tahun berjalan	trilyun rupiah	1,6	6.913.518.719	0,4	Kepala Dinas
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	Jumlah PMA/ PMDN berdasarkan jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam tahun berjalan.	investor	3.000	6.913.518.719	750	Kepala Dinas
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan Pengembangan iklim penanaman modal yang disusun**	(kebijakan penanaman modal tahun n/jumlah kebijakan yang akan disusun) x 100 %	**%**	40	120.000.000	0	Kepala Dinas
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi	Dokumen tahun n	dokumen	1	120.000.000	0	Koord Penanaman Modal
18.02.02.01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dokumen tahun n	dokumen	1	120.000.000	0	
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/besar**	(penanaman modal terealisasi/ jumlah minat penanaman modal) x 100%	**%**	20	131.500.000	2	Kepala Dinas
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah even promosi	Jumlah even promosi tahun n	kali	2	131.500.000	0	Koord Penanaman Modal
8.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen tahun n	Dokumen	2	131.500.000	0	Tim Kerja Promosi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan**	nilai indeks pada tahun n	Poin	84,00	418.034.000	84,00	Kepala Dinas
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	(jumlah SP/jml layanan perizinan & nonperizinan berdasarkan kewenangan) x 100%	%	100	418.034.000	100	Koord PTSP
18.04.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan usaha Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan usaha tahun n	Pelaku usaha	150	70.000.000	0	TimKerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
18.04.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah permohonan perizinan berusaha nonperizinan tahun n	Pelaku Usaha	1.250	113.264.000	250	TimKerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
18.04.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pemohon layanan konsultasi dan informasi tahun n	Orang	80	45.000.000	20	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.04.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang perizinan Berusaha Berbasis Risiko	jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pemeriksaan perizinan berusaha dan nonperizinan tahun n	Kegiatan Usaha	500	189.770.000	125	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	(jumlah pelaku usaha kecil menengah & besar yang menyampaikan LKPM/ jumlah pelaku usaha kecil menengah dan besar) x 100%	**%**	10	582.619.000	2	Kepala Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	(Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan yang dilaksanakan/ Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan sesuai kewenangan) x 100%	**%**	100	582.619.000	100	Koord Penanaman Modal
18.05.01.01	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tahun n	Pelaku Usaha	210	407.834.000	35	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan
18.05.01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusahatahun n	Kegiatan Usaha	150	174.785.000	35	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik**	(jumlah jenis data yang tersusun dengan baik/ jumlah jenis data yang seharusnya disediakan) x 100 %	%	50	32.000.000	0	Kepala Dinas
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan	(jumlah penyediaan data jenis izin/ jumlah Perizinan yang didelegasikan) x 100%	%	50	32.000.000	0	Koord PTSP
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah dokumen dan data informasi perizinan dan nonperizinan yang disusun tahun n	Dokumen	1	32.000.000	0	Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah tahun n-1	predikat	70,30	5.364.340.708	0	Kepala Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah**	(Jumlah kegiatan pada urusan penunjang yang dilaksanakan/ jumlah kegiata n pada urusan penunjang yang menjadi kewenangan) x 100%	%	100	5.629.365.719	25	Kepala Dinas
18.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun pada tahun n	Dokumen	3	6.938.000	1	Sekretaris
18.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan yang disusun pada tahun n	Dokumen	2	3.524.000	1	Tim Kerja PEP
18.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen capaian kinerja yang disusun pada tahun n	dokumen	1	3.414.000	1	Tim Kerja PEP
18.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun n	bulan	12	3.531.127.719	3	Sekretaris
18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tahun n	Orang/ bulan	25	3.531.127.719	25	Tim Kerja Keuangan
18.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah tahun n	dokumen	2	58.196.000	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah pegawai yang mengikuti diklat tahun n	dokumen	4	15.596.000	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti bimtek tahun n	orang	40	42.600.000	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	628.634.000	3	Sekretaris
18.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	penyediaan paket komponen instalasi listrik tahun n	paket	4	35.570.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	paket	6	268.455.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	penyediaan paket logistik tahun n	paket	4	69.630.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	penyediaan paket barang cetakan dan penggandaan tahun n	Paket	4	96.875.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	penyediaan dokumen bahan bacaan tahun n	dokumen	1	6.000.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan biaya perjalanan dinas luar daerah non kegiatan tahun n	laporan	25	100.000.000	6	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen penataausahaan arsip tahun n	Dokumen	1	13.000.000	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun n	dokumen	1	39.104.000	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	laporan pengadaan barang	laporan	2	207.948.241	1	Sekretaris
18.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket pengadaan mebel tahun n	Paket	2	53.340.000	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n	unit	4	154.608.241	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n	Bulan	12	914.714.000	3	Sekretaris
18.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan jasa surat menyurat tahun n	laporan	4	4.994.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik tahun n	Laporan	4	450.000.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Laporan	4	78.682.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	penyediaan jasa tenaga harian lepas tahun n	Laporan	4	381.028.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	laporan pemeliharaan barang milik daerah tahun n	laporan	2	281.807.759	3	Sekretaris
18.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan tahun n	Unit	3	59.470.000	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan operasional atau lapangan tahun n	unit	16	106.840.000	12	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	pemeliharaan mebel tahun n	unit	57	10.461.000	12	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	pemeliharaan aset tetap tahun n	unit	3	18.260.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	pemeliharaan gedung kantor tahun n	unit	1	43.720.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dire habilitasi	pemeliharaan sarana dan prasarana gedung tahun n	unit	51	43.056.759	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian

TABEL 2

MONITORING EVALUASI KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

TRIWULAN I TAHUN 2024

NO	Tujuan/ Sasaran / Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator/ Tujuan/ Sasaran /Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Anggaran	Target Pelaksanaan Tri Wulan I	Realisasi Tri Wulan I	Capaian Tri Wulan I	Ket	Analisa Capaian		Penanggung jawab
										Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	trilyun rupiah	1,600	6.913.518.719	0,4	0,43	108%	Tuntas	Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan *Online Single Submission Risk Based Aproch* (OSS-RBA)	Peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting demi menarik minat calon investor untuk menanamkan modal	Kepala Dinas
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	investor	3.000	6.913.518.719	750	3675	490%	Tuntas	Peningkatan PMA/PMDN dipengaruhi oleh faktor meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi	peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi	Kepala Dinas
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan Pengembangan iklim penanaman modal yang disusun**	**%**	40	120.000.000	0	0	0%	Belum Tuntas	Saat ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Peningkatan progres kegiatan	Kepala Dinas
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi	dokumen	1	120.000.000	0	0	0%	Belum Tuntas	Saat ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Peningkatan progres kegiatan	Koord Penanaman Modal
18.02.02. 01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	dokumen	1	120.000.000	0	0	0%	Belum Tuntas	Saat ini masih dalam tahap pemilihan penyedia	Peningkatan progres pelaksanaan kegiatan	
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/besar**	**%**	20	131.500.000	2	9,09	455%	Tuntas	Kemudahan dalam informasi peluang investasi	Peningkatan layanan investasi	Kepala Dinas

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah even promosi	kali	2	131.500.000	0	0	0%	Belum Tuntas	Saat ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Peningkatan progres kegiatan	Koord Penanaman Modal
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	131.500.000	0	0	0%	Belum Tuntas	Tahap pemilihan lokasi dan waktu pameran	Peningkatan progres kegiatan	Tim Kerja Promosi
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan**	Poin	84,00	418.034.000	84	89,50	106%	Tuntas	Kemudahan layanan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan	Kepala Dinas
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	%	100	418.034.000	100	100	100%	Tuntas	Komitmen peningkatan kualitas layanan	Identifikasi kualitas layanan	Koord PTSP
18.04.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan usaha	150	70.000.000	0	0	0%	Belum Tuntas	Tahap perencanaan, penetapan pelaku usaha	Peningkatan progres kegiatan	Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
18.04.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1.250	113.264.000	250	511	204%	Tuntas	Kemudahan layanan perizinan dan nonperizinan	Peningkatan kualitas layanan dengan berpedoman pada SOP dan SP	Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
18.04.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Orang	80	45.000.000	20	31	155%	Tuntas	Meningkatnya kualitas layanan	Peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan pengaduan	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.04.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kegiatan Usaha	500	189.770.000	125	197	158%	Tuntas	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan nonperizinan	Peningkatan kualitas layanan dengan berpedoman pada SOP dan SP	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**%**	10	582.619.000	2	25	1250%	Tuntas	Kemudahan layanan LKPM melalui sistem	Peningkatan pendampingan LKPM	Kepala Dinas
18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	**%**	100	582.619.000	100	100	100%	Tuntas	Kemudahan layanan LKPM melalui sistem	Peningkatan pendampingan penyusunan laporan	Koord Penanaman Modal
18.05.01.01	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	210	407.834.000	35	35	100%	Tuntas	Kegiatan sesuai rencana	Komitmen pelaksanaan kegiatan seusai rencana	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan
18.05.01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	150	174.785.000	35	27	77%	Belum Tuntas	Terdapat perubahan dalam penjadwalan kegiatan	Penjadwalan ulang kegiatan	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik**	%	50	32.000.000	25	25	100%	Tuntas	Sumber data telah tersedia pada sistem	Peningkatan penggunaan sistem informasi	Kepala Dinas
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan	%	50	32.000.000	25	100	400%	Tuntas	Sumber data telah tersedia pada sistem	Peningkatan penggunaan sistem informasi	Koord PTSP

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	32.000.000	1	6	600%	Tuntas	Sumber data telah tersedia pada sistem	Peningkatan penggunaan sistem informasi	Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	predikat	70,30	5.364.340.708	0	0	0%	Belum Tuntas	Pada periode penilaian SAKIP baru pada tahap *desk* konfirmasi data dukung	Penyiapan data dukung SAKIP	Kepala Dinas
18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah**	%	100	5.629.365.719	25	25	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Optimalisasi sumberdaya pendukung	Kepala Dinas
18.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	3	6.938.000	2	2	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Optimalisasi sumberdaya pendukung	Sekretaris
18.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.524.000	1	1	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Optimalisasi sumberdaya pendukung	Tim Kerja PEP
18.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1	3.414.000	1	1	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Optimalisasi sumberdaya pendukung	Tim Kerja PEP
18.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	3.531.127.719	3	3	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Optimalisasi sumberdaya pendukung	Sekretaris
18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25	3.531.127.719	25	24	96%	Belum Tuntas	Terdapat ASN yang pensiun	Penimgkatan pelaksanaan TW berikutnya	Tim Kerja Keuangan

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	dokumen	2	58.196.000	0	0	0%	Belum Tuntas	Saat ini baru tahap perencanaan	Identifikasi jenis diklat dan bimtek	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	dokumen	4	15.596.000	0	0	0%	Belum Tuntas	Pengiriman diklat sesuai dengan prioritas dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	Identifikasi jenis diklat	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	40	42.600.000	0	0	0%	Belum Tuntas	Saat ini sedang pada tahap perencanaan/ identifikasi prioritas kegiatan	Kegiatan direncanakan pada Tri Wulan IV	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	628.634.000	3	3	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Komitmen pencapaian target kinerja	Sekretaris
18.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	35.570.000	1	2	200%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6	268.455.000	1	2	200%	Tuntas	Peningkatan realisasi kinerja untuk mendukung operasional kantor	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	69.630.000	1	1	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	96.875.000	1	1	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	6.000.000	1	1	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	25	100.000.000	8	10	125%	Tuntas	Peningkatan koordinasi luar kota	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	13.000.000	0	0	0%	Belum Tuntas	Peningkatan koordinasi luar kota	Peningkatan pelaksanaan TW berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	39.104.000	0	0	0%	Belum Tuntas	Saat ini sedang pada tahap perencanaan/ identifikasi prioritas sasaran	Kegiatan direncanakan pada Tri Wulan III	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	laporan	2	207.948.241	1	0	0%	Belum Tuntas	Saat ini pada tahap perencanaan	Peningkatan pelaksanaan TW berikutnya	Sekretaris
18.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	53.340.000	3	0	0%	Belum Tuntas	Terdapat perubahan rencana pelaksanaan	Pelaksanaan sesuai jadwal	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	4	154.608.241	3	0	0%	Belum Tuntas	Terdapat perubahan rencana pelaksanaan	Pelaksanaan diharapkan sesuai jadwal	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	914.714.000	3	3	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Sekretaris
18.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	4.994.000	1	1	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	450.000.000	1	1	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Penyediaan jasa sesuai kebutuhan prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	78.682.000	1	1	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Penyediaan jasa sesuai kebutuhan prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	381.028.000	1	1	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Penyediaan jasa sesuai kebutuhan prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	laporan	2	281.807.759	1	1	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Pelaksanaan kegiatan sesuai prioritas	Sekretaris
18.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	59.470.000	3	2	67%	Belum Tuntas	Kendaraan masih dalam kondisi yang cukup baik	Pemeliharaan/ perbaikan kendaraan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	106.840.000	12	4	33%	Belum Tuntas	Kendaraan masih dalam kondisi yang cukup baik	Pemeliharaan/ perbaikan kendaraan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	57	10.461.000	12	0	0%	Belum Tuntas	Sebagian mebel masih cukup layak	Pemeliharaan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	3	18.260.000	1	0	0%	Belum Tuntas	Sebagian masih cukup layak	Pemeliharaan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	43.720.000	1	1	100%	Tuntas	Beberapa bagian gedung telah perlu dilakukan perbaikan	Perbaikan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	51	43.056.759	0	0	0%	Belum Tuntas	Sebagian sarpras gedung masih cukup layak	Pemeliharaan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan 1 Tahun 2024 terdapat 23 rekomendasi/saran yang perlu ditindaklanjuti yang perlu dilaksanakan pada periode triwulan selanjutnya, antara lain sebagaimana berikut:

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Uraian Kondisi/ Rekomendasi Hasil Monev Triwulan I Tahun 2024	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Saat ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Peningkatan progres kegiatan	Belum Tuntas
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Saat ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Peningkatan progres kegiatan	Belum Tuntas
18.02.02.01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Saat ini masih dalam tahap pemilihan penyedia	Peningkatan progres pelaksanaan kegiatan	Belum Tuntas
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Saat ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Peningkatan progres kegiatan	Belum Tuntas
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tahap pemilihan lokasi dan waktu pameran	Peningkatan progres kegiatan	Belum Tuntas
18.04.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Tahap perencanaan, penetapan pelaku usaha	Peningkatan progres kegiatan	Belum Tuntas
18.05.01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Terdapat perubahan dalam rencana kegiatan	Penjadwalan ulang kegiatan dengan memperhatikan capaian kinerja	Belum Tuntas
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Pada periode penilaian SAKIP baru pada tahap *desk* konfirmasi data dukung	Penyiapan data dukung SAKIP	Belum Tuntas
18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terdapat ASN yang pensiun	Penimgkatan pelaksanaan TW berikutnya	Belum Tuntas
18.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Saat ini baru tahap perencanaan	Identifikasi jenis diklat dan bimtek	Belum Tuntas
18.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman diklat sesuai dengan prioritas dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	Identifikasi jenis diklat	Belum Tuntas
18.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Saat ini sedang pada tahap perencanaan/ identifikasi prioritas kegiatan	Kegiatan direncanakan pada Tri Wulan IV	Belum Tuntas
18.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan koordinasi luar kota	Peningkatan pelaksanaan TW berikutnya	Belum Tuntas
18.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Saat ini sedang pada tahap perencanaan/ identifikasi prioritas sasaran	Kegiatan direncanakan pada Tri Wulan III	Belum Tuntas
18.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Saat ini pada tahap perencanaan	Peningkatan pelaksanaan TW berikutnya	Belum Tuntas

1	2	3	4	5
18.01.07.05	Pengadaan Mebel	Terdapat perubahan rencana pelaksanaan	Penjadwalan ulang kegiatan dengan memperhatikan capaian kinerja	Belum Tuntas
18.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terdapat perubahan rencana pelaksanaan	Penjadwalan ulang kegiatan dengan memperhatikan capaian kinerja	Belum Tuntas
18.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan masih dalam kondisi yang cukup baik	peningkatan realisasi kinerja pada TW berikutnya sesuai prioritas	Belum Tuntas
18.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan masih dalam kondisi yang cukup baik	peningkatan realisasi kinerja pada TW berikutnya sesuai prioritas	Belum Tuntas
18.01.09.02	Pemeliharaan Mebel	Sebagian mebel masih cukup layak	peningkatan realisasi kinerja pada TW berikutnya sesuai prioritas	Belum Tuntas
18.01.09.05	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Sebagian masih cukup layak	peningkatan realisasi kinerja pada TW berikutnya sesuai prioritas	Belum Tuntas
18.01.09.07	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Beberapa bagian gedung telah perlu dilakukan perbaikan	peningkatan realisasi kinerja pada TW berikutnya sesuai prioritas	Belum Tuntas
18.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sebagian sarpras gedung masih cukup layak	peningkatan realisasi kinerja pada TW berikutnya sesuai prioritas	Belum Tuntas

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

a. Capaian Kinerja Tujuan 1: Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dengan Indikator, Jumlah Nilai investasi tercapai **108 %** atau dengan kategori **Sangat Baik**;

b. Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan Indikator Jumlah PMA/ PMDN tercapai sebesar **490%** atau dengan kategori **Sangat Baik**;

Capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen, sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 terdapat kegiatan yang telah terlaksana dan ada yang belum terlaksana, dan diharapkan akan selesai sesuai anggaran kas.

2. Saran

Berdasarkan simpulan dan capaian kinerja dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

a. Penguatan dalam pencapaian realisasi penanaman modal dan

PMA/PMD dengan pemberian kemudahan layanan perizinan berusaha.

b. Percepatan dalam pencapaian realisasi kinerja terhadap 23 rekomendasi/ saran, sehingga dapat target kinerja dapat tercapai.

E. PENUTUP

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan I Tahun 2024, dengan harapan kami dapat terus meningkatkan pencapaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Sragen, April 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SRAGEN



DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.SI
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr.Soetomo No.5 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website : http://dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN-57213

LAPORAN MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN II TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Monitoring dan evaluasi merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring dan evaluasi ini merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan kinerja yang telah berlangsung di DPMPTSP Kabupaten Sragen sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2024 yang telah disusun.

Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada periode berikutnya.

2. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen bertujuan untuk menilai tingkat capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun pada awal Tahun Anggaran 2024. Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan di periode berikutnya pada tahun berjalan.

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2024 dan dilaksanakan pada periode Triwulan II Tahun 2024.

4. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2024, pada Triwulan II dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang riil atas pelaksanaan capaian kinerja dari rencana aksi tahunan yang telah disusun untuk Triwulan II Tahun 2024, yang memuat perkembangan progress/ kemajuan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana tugas masing-masing program, kegiatan, subkegiatan sampai dengan rincian aktivitas.

Hasil evaluasi ini selain sebagai dasar evaluasi atas capaian kinerja juga sekaligus dapat dijadikan untuk memberikan rekomendasi dalam menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

C. HASIL YANG DICAPAI

Rencana Aksi Tahun 2024 ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang pada Tabel 1.

Sedangkan hasil pencapaian per Triwulan II Tahun 2024, realisasi capaian kinerja diuraikan sebagaimana Tabel 2;

TABEL 1
RENCANA AKSI DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN
TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN TRIWULAN II	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	Nilai investasi dalam tahun berjalan	trilyun rupiah	1,6	6.913.518.719	0,8	Kepala Dinas
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	Jumlah PMA/ PMDN berdasarkan jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam tahun berjalan.	investor	3.000	6.913.518.719	1500	Kepala Dinas
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan Pengembangan iklim penanaman modal yang disusun**	(kebijakan penanaman modal tahun n/jumlah kebijakan yang akan disusun) x 100 %	**%**	40	120.000.000	40	Kepala Dinas
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi	Dokumen tahun n	dokumen	1	120.000.000	1	Koord Penanaman Modal
18.02.02.01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dokumen tahun n	dokumen	1	120.000.000	1	
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/besar**	(penanaman modal terealisasi/ jumlah minat penanaman modal) x 100%	**%**	20	131.500.000	8	Kepala Dinas
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman	jumlah even promosi	Jumlah even promosi tahun n	kali	2	131.500.000	1	Koord Penanaman

	Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							Modal
8.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen tahun n	Dokumen	2	131.500.000	1	Tim Kerja Promosi
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan**	nilai indeks pada tahun n	Poin	84,00	418.034.000	83	Kepala Dinas
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	(jumlah SP/jml layanan perizinan & nonperizinan berdasarkan kewenangan) x 100%	%	100	418.034.000	100	Koord PTSP
18.04.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan usaha tahun n	Kegiatan usaha	150	70.000.000	150	
18.04.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah permohonan perizinan berusaha nonperizinan tahun n	Pelaku Usaha	1.250	113.264.000	1000	
18.04.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pemohon layanan konsultasi dan informasi tahun n	Orang	80	45.000.000	40	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.04.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang	jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pemeriksaan perizinan berusaha dan nonperizinan tahun n	Kegiatan Usaha	500	189.770.000	300	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan

		perizinan Berusaha Berbasis Risiko						Pengelolaan Pengaduan
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	(jumlah pelaku usaha kecil menengah & besar yang menyampaikan LKPM/ jumlah pelaku usaha kecil menengah dan besar) x 100%	**%**	10	582.619.000	2	Kepala Dinas
18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	(Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan yang dilaksanakan/ Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan sesuai kewenangan) x 100%	**%**	100	582.619.000	25	Koord Penanaman Modal
18.05.01.01	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Imple mentasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tahun n	Pelaku Usaha	210	407.834.000	100	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan
18.05.01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusahatahun n	Kegiatan Usaha	150	174.785.000	25	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik**	(jumlah jenis data yang tersusun dengan baik/ jumlah jenis data yang seharusnya disediakan) x 100 %	%	50	32.000.000	50	Kepala Dinas

18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan	(jumlah penyediaan data jenis izin/ jumlah Perizinan yang didelegasikan) x 100%	%	50	32.000.000	50	Koord PTSP
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah dokumen dan data informasi perizinan dan nonperizinan yang disusun tahun n	Dokumen	1	32.000.000	1	Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah tahun n-1	predikat	70,30	5.364.340.708	0	Kepala Dinas
18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah**	(Jumlah kegiatan pada urusan penunjang yang dilaksanakan/ jumlah kegiata n pada urusan penunjang yang menjadi kewenangan) x 100%	%	100	5.629.365.719	50	Kepala Dinas
18.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun pada tahun n	Dokumen	3	6.938.000	3	Sekretaris
18.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan yang disusun pada tahun n	Dokumen	2	3.524.000	2	Tim Kerja PEP
18.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen capaian kinerja yang disusun pada tahun n	dokumen	1	3.414.000	1	Tim Kerja PEP
18.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun n	bulan	12	3.531.127.719	6	Sekretaris

18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tahun n	Orang/ bulan	25	3.531.127.719	24	Tim Kerja Keuangan
18.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah tahun n	dokumen	2	58.196.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah pegawai yang mengikuti diklat tahun n	dokumen	4	15.596.000	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti bimtek tahun n	orang	40	42.600.000	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	628.634.000	6	Sekretaris
18.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	penyediaan paket komponen instalasi listrik tahun n	paket	4	35.570.000	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	paket	6	268.455.000	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	penyediaan paket logistik tahun n	paket	4	69.630.000	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	penyediaan paket barang cetakan dan penggandaan tahun n	Paket	4	96.875.000	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	penyediaan dokumen bahan bacaan tahun n	dokumen	1	6.000.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian

18.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan biaya perjalanan dinas luar daerah non kegiatan tahun n	laporan	25	100.000.000	31	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen penataausahaan arsip tahun n	Dokumen	1	13.000.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun n	dokumen	1	39.104.000	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	laporan pengadaan barang	laporan	2	207.948.241	2	Sekretaris
18.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket pengadaan mebel tahun n	Paket	2	53.340.000	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n	unit	4	154.608.241	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n	Bulan	12	914.714.000	6	Sekretaris
18.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan jasa surat menyurat tahun n	laporan	4	4.994.000	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik tahun n	Laporan	4	450.000.000	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Laporan	4	78.682.000	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian

18.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	penyediaan jasa tenaga harian lepas tahun n	Laporan	4	381.028.000	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	laporan pemeliharaan barang milik daerah tahun n	laporan	2	281.807.759	2	Sekretaris
18.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan tahun n	Unit	3	59.470.000	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan operasional atau lapangan tahun n	unit	16	106.840.000	12	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	pemeliharaan mebel tahun n	unit	57	10.461.000	45	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	pemeliharaan aset tetap tahun n	unit	3	18.260.000	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	pemeliharaan gedung kantor tahun n	unit	1	43.720.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dire habilitasi	pemeliharaan sarana dan prasarana gedung tahun n	unit	51	43.056.759	15	Kasubag Umum dan Kepegawaian

TABEL 2

MONITORING EVALUASI KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	Tujuan/ Sasaran / /Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran / /Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Anggaran	Target Pelaksanaan Tri Wulan II	Realisasi Tri Wulan II	Capaian Tri Wulan II	Ket	Analisa Capaian Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	Penanggung Jawab
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	trilyun rupiah	1,6	6.913.518.719	0,8	1,3	163%	Tuntas	Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan *Online Single Submission Risk Based Aproch* (OSS-RBA)	Peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting demi menarik minat calon investor untuk menanamkan modal	Kepala Dinas
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	investor	3.000	6.913.518.719	1500	6271	418%	Tuntas	Peningkatan PMA/PMDN dipengaruhi oleh faktor meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi	peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi	Kepala Dinas
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan Pengembangan iklim penanaman modal yang disusun**	**%**	40	120.000.000	0	20	100%	Tuntas	Saat ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Peningkatan progres kegiatan	Kepala Dinas
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi	dokumen	1	120.000.000	0	1	100%	Tuntas	Saat ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Peningkatan progres kegiatan	Koord PM
18.02.02. 01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	dokumen	1	120.000.000	0	1	100%	Tuntas	Saat ini masih dalam tahap pemilihan penyedia	Peningkatan progres pelaksanaan kegiatan	Tim Kerja Pengembangan

18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/ besar**	**%**	20	131.500.000	8	12,5	156%	Tuntas	Kemudahan dalam informasi peluang investasi	Peningkatan layanan investasi	Kepala Dinas
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah even promosi	kali	2	131.500.000	0	1	100%	Tuntas	Saat ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Peningkatan progres kegiatan	Koord Penanaman Modal
18.03.01. 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	131.500.000	0	1	100%	Tuntas	Tahap pemilihan lokasi dan waktu pameran	Peningkatan progres kegiatan	Tim Kerja Promosi
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan**	Poin	84	418.034.000	84	91	108%	Tuntas	Kemudahan layanan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan	Kepala Dinas
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	%	100	418.034.000	100	100	100%	Tuntas	Komitmen peningkatan kualitas layanan	Identifikasi kualitas layanan	Koord PTSP
18.04.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		150	97.077.000	90	63	0%	Belum Tuntas	Tahap perencanaan, penetapan pelaku usaha	Peningkatan progres kegiatan	Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
18.04.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1.250	113.264.000	500	1.012.00	2024%	Tuntas	Kemudahan layanan perizinan dan nonperizinan	Peningkatan kualitas layanan dengan berpedoman pada SOP dan SP	Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

18.04.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Orang	80	45.000.000	40	40	100%	Tuntas	Meningkatnya kualitas layanan	Peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan pengaduan	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.04.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kegiatan Usaha	500	189.770.000	250	380	152%	Tuntas	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan nonperizinan	Peningkatan kualitas layanan dengan berpedoman pada SOP dan SP	Tim Kerja
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**%**	10	582.619.000	5	67,23	1345%	Tuntas	Kemudahan layanan LKPM melalui sistem	Peningkatan pendampingan LKPM	Kepala Dinas
18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	**%**	100	582.619.000	100	100	100%	Tuntas	Kemudahan layanan LKPM melalui sistem	Peningkatan pendampingan penyusunan laporan	Koord Penanaman Modal
18.05.01. 01	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	210	407.834.000	140	100	71%	Belum Tuntas	Kegiatan sesuai rencana	Komitmen pelaksanaan kegiatan seusai rencana	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan
18.05.01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi	Kegiatan Usaha	150	174.785.000	70	50	71%	Belum Tuntas	Terdapat perubahan dalam penjadwalan kegiatan	Penjadwalan ulang kegiatan	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan

		Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha										
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik**	%	50	32.000.000	0	100	100%	Tuntas	Sumber data telah tersedia pada sistem	Peningkatan penggunaan sistem informasi	Kepala Dinas
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan	%	50	32.000.000	0	100	100%	Tuntas	Sumber data telah tersedia pada sistem	Peningkatan penggunaan sistem informasi	Koord PTSP
18.06.01. 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	32.000.000	0	4	100%	Tuntas	Sumber data telah tersedia pada sistem	Peningkatan penggunaan sistem informasi	Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	predikat	70,3	5.364.340.708	70,3	0	0%	Belum Tuntas	Pada periode penilaian SAKIP baru pada tahap *desk* konfirmasi data dukung	Penyiapan data dukung SAKIP	Kepala Dinas
18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah**	%	100	5.629.365.719	50	50	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Optimalisasi sumberdaya pendukung	Kepala Dinas
18.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	3	6.938.000	2	3	150%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Optimalisasi sumberdaya pendukung	Sekretaris
18.01.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.524.000	2	2	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Optimalisasi sumberdaya pendukung	Tim Kerja PEP

18.01.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1	3.414.000	1	1	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Optimalisasi sumberdaya pendukung	Tim Kerja PEP
18.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	3.531.127.719	6	6	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Optimalisasi sumberdaya pendukung	Sekretaris
18.01.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25	3.531.127.719	25	24	96%	Belum Tuntas	Terdapat ASN yang pensiun	Penimgkatan pelaksanaan TW berikutnya	Tim Kerja Keuangan
18.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	dokumen	2	58.196.000	1	1	100%	Tuntas	Saat ini baru tahap perencanaan	Identifikasi jenis diklat dan bimtek	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	dokumen	4	15.596.000	2	0	0%	Belum Tuntas	Pengiriman diklat sesuai dengan prioritas dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	Identifikasi jenis diklat	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	orang	40	42.600.000	40	0	0%	Belum Tuntas	Saat ini sedang pada tahap perencanaan/ identifikasi prioritas kegiatan	Kegiatan direncanakan pada Tri Wulan IV	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	628.634.000	6	6	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Komitmen pencapaian target kinerja	Sekretaris
18.01.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	35.570.000	2	2	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian

18.01.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6	268.455.000	2	4	200%	Tuntas	Peningkatan realisasi kinerja untuk mendukung operasional kantor	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	69.630.000	2	2	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	96.875.000	1	2	200%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	6.000.000	1	2	200%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	25	100.000.000	12	31	258%	Tuntas	Peningkatan koordinasi luar kota	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	13.000.000	1	1	100%	Tuntas	Peningkatan koordinasi luar kota	Peningkatan pelaksanaan TW berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	39.104.000	0	0	0%	Belum Tuntas	Saat ini sedang pada tahap perencanaan/ identifikasi prioritas sasaran	Kegiatan direncanakan pada Tri Wulan III	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	laporan	2	207.948.241	1	0	0%	Belum Tuntas	Saat ini pada tahap perencanaan	Peningkatan pelaksanaan TW berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	53.340.000	2	1	50%	Belum Tuntas	Terdapat perubahan rencana pelaksanaan	Pelaksanaan sesuai jadwal	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	4	154.608.241	2	1	50%	Belum Tuntas	Terdapat perubahan rencana pelaksanaan	Pelaksanaan diharapkan sesuai jadwal	Kasubag Umum dan Kepegawaian

18.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	914.714.000	6	6	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	4.994.000	2	2	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	450.000.000	2	2	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Penyediaan jasa sesuai kebutuhan prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	78.682.000	2	2	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Penyediaan jasa sesuai kebutuhan prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	381.028.000	2	2	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Penyediaan jasa sesuai kebutuhan prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	laporan	2	281.807.759	6	4	67%	Belum Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Pelaksanaan kegiatan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	59.470.000	3	3	100%	Tuntas	Kendaraan masih dalam kondisi yang cukup baik	Pemeliharaan/ perbaikan kendaraan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	106.840.000	12	12	100%	Tuntas	Kendaraan masih dalam kondisi yang cukup baik	Pemeliharaan/ perbaikan kendaraan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09. 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	57	10.461.000	24	44	183%	Tuntas	Sebagian mebel masih cukup layak	Pemeliharaan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian

18.01.09. 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	3	18.260.000	2	0	0%	Belum Tuntas	Sebagian masih cukup layak	Pemeliharaan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09. 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	43.720.000	1	1	100%	Tuntas	Beberapa bagian gedung telah perlu dilakukan perbaikan	Perbaikan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09. 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	51	43.720.000	15	18	120%	Tuntas	Sebagian sarpras gedung masih cukup layak	Pemeliharaan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan II Tahun 2024 terdapat 8 (delapan) rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yang perlu dilaksanakan pada periode triwulan selanjutnya, antara lain sebagaimana berikut:

No	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Sebagian telah direalisasi	Peningkatan progres kegiatan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sebagian telah direalisasi	Peningkatan progres kegiatan
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sebagian telah direalisasi	Peningkatan progres kegiatan
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Saat ini sedang pada tahap perencanaan/ identifikasi prioritas kegiatan	Kegiatan direncanakan pada Tri Wulan IV
4.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Saat ini sedang pada tahap perencanaan/ identifikasi prioritas sasaran	Kegiatan direncanakan pada Tri Wulan III
5.	Pengadaan Mebel	Sebagian kegiatan telah direalisasikan	Pelaksanaan sesuai jadwal
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sebagian kegiatan telah direalisasikan	Pelaksanaan diharapkan sesuai jadwal
7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Sebagian masih cukup layak	Pemeliharaan sesuai prioritas
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Sebagian telah direalisasi	Peningkatan progres kegiatan

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Capaian kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut;

a. Capaian kinerja Tujuan 1: Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dengan Indikator Jumlah Nilai investasi tercapai **163 %** atau dengan kategori **Sangat Baik**;
b. Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan Indikator Jumlah PMA/ PMDN tercapai sebesar **418%** atau dengan kategori **Sangat Baik**;

Secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen tidak terdapat permasalahan berarti dalam arti kinerja yang dilaksanakan telah mencapai target yang telah disusun sebelumnya.

2. Saran

Berdasarkan simpulan dan capaian kinerja dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

a. Penguatan dalam pencapaian realisasi penanaman modal dan PMA/PMD dengan pemberian kemudahan layanan perizinan berusaha.
b. Mengupayakan secara maksimal terhadap pencapaian sasaran penujang, **Meningkatnya predikat SAKIP perangkat daerah**.
c. Percepatan dalam pencapaian realisasi kinerja terhadap 8 (delapan) rekomendasi/ saran, sehingga dapat target kinerja dapat tercapai

E. PENUTUP

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana aksi kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan II Tahun 2024.

Sragen, Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sragen

Dwi Agus Prasetyo, S.STP, M.Si
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr.Soetomo No.5 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website : http://dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN-57213

LAPORAN MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Monitoring dan evaluasi merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring dan evaluasi ini merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan kinerja yang telah berlangsung di DPMPTSP Kabupaten Sragen sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2024 yang telah disusun.

Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada periode berikutnya.

2. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen bertujuan untuk menilai tingkat capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun pada awal Tahun Anggaran 2024. Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan di periode berikutnya pada tahun berjalan.

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2024 dan dilaksanakan pada periode Triwulan III Tahun 2024.

4. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2024, pada Triwulan III dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang riil atas pelaksanaan capaian kinerja dari rencana aksi tahunan yang telah disusun untuk Triwulan III Tahun 2024, yang memuat perkembangan progress/ kemajuan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana tugas masing-masing program, kegiatan, subkegiatan sampai dengan rincian aktivitas.

Hasil evaluasi ini selain sebagai dasar evaluasi atas capaian kinerja juga sekaligus dapat dijadikan untuk memberikan rekomendasi dalam menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

C. HASIL YANG DICAPAI

Rencana Aksi Tahun 2024 ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang pada Tabel 1.

Sedangkan hasil pencapaian per Triwulan III Tahun 2024, realisasi capaian kinerja diuraikan sebagaimana Tabel 2;

TABEL 1

RENCANA AKSI KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN TRIWULAN III TAHUN 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN TRIWULAN III	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	Nilai investasi dalam tahun berjalan	trilyun rupiah	1,600	6.913.518.719	1.2	Kepala Dinas
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	Jumlah PMA/ PMDN berdasarkan jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam tahun berjalan.	investor	3.000	6.913.518.719	2250	Kepala Dinas
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan Pengembangan iklim penanaman modal yang disusun**	(kebijakan penanaman modal tahun n/jumlah kebijakan yang akan disusun) x 100 %	**%**	40	120.000.000	20	Kepala Dinas
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi	Dokumen tahun n	dokumen	1	120.000.000	1	Koord Penanaman Modal
18.02.02.01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dokumen tahun n	dokumen	1	120.000.000	1	
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/besar**	(penanaman modal terealisasi/ jumlah minat penanaman modal) x 100%	**%**	20	131.500.000	15	Kepala Dinas
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah even promosi	Jumlah even promosi tahun n	kali	2	131.500.000	1	Koord Penanaman Modal
8.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen tahun n	Dokumen	2	131.500.000	1	Tim Kerja Promosi
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan**	nilai indeks pada tahun n	Poin	84,00	418.034.000	84	Kepala Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	(jumlah SP/jml layanan perizinan & nonperizinan berdasarkan kewenangan) x 100%	%	100	418.034.000	100	Koord PTSP
18.04.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan usaha Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan usaha tahun n	Pelaku usaha	150	70.000.000	150	TimKerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
18.04.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah permohonan perizinan berusaha nonperizinan tahun n	Pelaku Usaha	1.250	113.264.000	800	TimKerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
18.04.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pemohon layanan konsultasi dan informasi tahun n	Orang	80	45.000.000	60	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.04.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang perizinan Berusaha Berbasis Risiko	jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pemeriksaan perizinan berusaha dan nonperizinan tahun n	Kegiatan Usaha	500	189.770.000	375	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	(jumlah pelaku usaha kecil menengah & besar yang menyampaikan LKPM/ jumlah pelaku usaha kecil menengah dan besar) x 100%	**%**	10	582.619.000	7	Kepala Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	(Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan yang dilaksanakan/ Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan sesuai kewenangan) x 100%	**%**	100	582.619.000	100	Koord Penanaman Modal
18.05.01.01	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tahun n	Pelaku Usaha	210	407.834.000	210	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan
18.05.01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusahatahun n	Kegiatan Usaha	150	174.785.000	105	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik**	(jumlah jenis data yang tersusun dengan baik/ jumlah jenis data yang seharusnya disediakan) x 100 %	%	50	32.000.000	0	Kepala Dinas
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan	(jumlah penyediaan data jenis izin/ jumlah Perizinan yang didelegasikan) x 100%	%	50	32.000.000	0	Koord PTSP
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah dokumen dan data informasi perizinan dan nonperizinan yang disusun tahun n	Dokumen	1	32.000.000	0	Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah tahun n-1	predikat	70,30	5.364.340.708	70.3	Kepala Dinas
18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah**	(Jumlah kegiatan pada urusan penunjang yang dilaksanakan/ jumlah kegiata n pada urusan penunjang yang menjadi kewenangan) x 100%	%	100	5.629.365.719	75	Kepala Dinas
18.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun pada tahun n	Dokumen	3	6.938.000	3	Sekretaris
18.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan yang disusun pada tahun n	Dokumen	2	3.524.000	2	Tim Kerja PEP
18.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen capaian kinerja yang disusun pada tahun n	dokumen	1	3.414.000	1	Tim Kerja PEP
18.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun n	bulan	12	3.531.127.719	9	Sekretaris
18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tahun n	Orang/ bulan	25	3.531.127.719	25	Tim Kerja Keuangan
18.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah tahun n	dokumen	2	58.196.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah pegawai yang mengikuti diklat tahun n	dokumen	4	15.596.000	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti bimtek tahun n	orang	40	42.600.000	40	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	628.634.000	9	Sekretaris

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	penyediaan paket komponen instalasi listrik tahun n	paket	4	35.570.000	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	paket	6	268.455.000	6	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	penyediaan paket logistik tahun n	paket	4	69.630.000	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	penyediaan paket barang cetakan dan penggandaan tahun n	Paket	4	96.875.000	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	penyediaan dokumen bahan bacaan tahun n	dokumen	1	6.000.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan biaya perjalanan dinas luar daerah non kegiatan tahun n	laporan	25	100.000.000	18	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen penataausahaan arsip tahun n	Dokumen	1	13.000.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun n	dokumen	1	39.104.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	laporan pengadaan barang	laporan	2	207.948.241	2	Sekretaris
18.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket pengadaan mebel tahun n	Paket	2	53.340.000	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n	unit	4	154.608.241	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n	Bulan	12	914.714.000	9	Sekretaris
18.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan jasa surat menyurat tahun n	laporan	4	4.994.000	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik tahun n	Laporan	4	450.000.000	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Laporan	4	78.682.000	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	penyediaan jasa tenaga harian lepas tahun n	Laporan	4	381.028.000	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	laporan pemeliharaan barang milik daerah tahun n	laporan	2	281.807.759	9	Sekretaris
18.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan tahun n	Unit	3	59.470.000	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan operasional atau lapangan tahun n	unit	16	106.840.000	16	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	pemeliharaan mebel tahun n	unit	57	10.461.000	40	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	pemeliharaan aset tetap tahun n	unit	3	18.260.000	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	pemeliharaan gedung kantor tahun n	unit	1	43.720.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dire habilitasi	pemeliharaan sarana dan prasarana gedung tahun n	unit	51	43720000	30	Kasubag Umum dan Kepegawaian

TABEL 2
MONITORING EVALUASI KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN
TRIWULAN III TAHUN 2024

NO	Tujuan/ Sasaran / Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator/ Tujuan/ Sasaran /Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Anggaran	Target Pelaksanaan Tri Wulan III	Realisasi Tri Wulan III	Capaian Tri Wulan III	Ket	Analisa Capaian		Penanggung jawab
										Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	trilyun rupiah	1,600	6.913.518.719	1.2	2.1	175%	Tuntas	Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan *Online Single Submission Risk Based Aproch* (OSS-RBA)	Peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting demi menarik minat calon investor untuk menanamkan modal	Kepala Dinas
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	investor	3.000	6.913.518.719	2250	9137	406%	Tuntas	Peningkatan PMA/PMDN dipengaruhi oleh faktor meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi	peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi	Kepala Dinas
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan Pengembangan iklim penanaman modal yang disusun**	**%**	40	120.000.000	20	30	100%	Tuntas	Saat ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Peningkatan progres kegiatan	Kepala Dinas
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi	dokumen	1	120.000.000	1	3	100%	Tuntas	Saat ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Peningkatan progres kegiatan	Koord Penanaman Modal
18.02.02. 01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	dokumen	1	120.000.000	1	1	100%	Tuntas	Saat ini masih dalam tahap pemilihan penyedia	Peningkatan progres pelaksanaan kegiatan	
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/besar**	**%**	20	131.500.000	15	15	100%	Tuntas	Kemudahan dalam informasi peluang investasi	Peningkatan layanan investasi	Kepala Dinas

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah even promosi	kali	2	131.500.000	1	1	100%	Tuntas	Saat ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Peningkatan progres kegiatan	Koord Penanaman Modal
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	131.500.000	1	1	100%	Tuntas	Tahap pemilihan lokasi dan waktu pameran	Peningkatan progres kegiatan	Tim Kerja Promosi
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan**	Poin	84,00	418.034.000	84	91	108%	Tuntas	Kemudahan layanan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan	Kepala Dinas
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	%	100	418.034.000	100	100	100%	Tuntas	Komitmen peningkatan kualitas layanan	Identifikasi kualitas layanan	Koord PTSP
18.04.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		150	97.077.000	150	120	80%	Tuntas	Tahap perencanaan, penetapan pelaku usaha	Peningkatan progres kegiatan	Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
18.04.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1.250	113.264.000	800	1.372	1715%	Tuntas	Kemudahan layanan perizinan dan nonperizinan	Peningkatan kualitas layanan dengan berpedoman pada SOP dan SP	Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
18.04.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Orang	80	45.000.000	60	72	120%	Tuntas	Meningkatnya kualitas layanan	Peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan pengaduan	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.04.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kegiatan Usaha	500	189.770.000	375	488	130%	Tuntas	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan nonperizinan	Peningkatan kualitas layanan dengan berpedoman pada SOP dan SP	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**%**	10	582.619.000	7	70	1000%	Tuntas	Kemudahan layanan LKPM melalui sistem	Peningkatan pendampingan LKPM	Kepala Dinas
18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	**%**	100	582.619.000	100	100	100%	Tuntas	Kemudahan layanan LKPM melalui sistem	Peningkatan pendampingan penyusunan laporan	Koord Penanaman Modal
18.05.01.01	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	210	407.834.000	210	180	86%	Belum Tuntas	Kegiatan sesuai rencana	Komitmen pelaksanaan kegiatan seusai rencana	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan
18.05.01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	150	174.785.000	105	122	116%	Tuntas	Terdapat perubahan dalam penjadwalan kegiatan	Penjadwalan ulang kegiatan	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik**	%	50	32.000.000	0	100	100%	Tuntas	Sumber data telah tersedia pada sistem	Peningkatan penggunaan sistem informasi	Kepala Dinas

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan	%	50	32.000.000	0	100	100%	Tuntas	Sumber data telah tersedia pada sistem	Peningkatan penggunaan sistem informasi	Koord PTSP
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	32.000.000	0	4	100%	Tuntas	Sumber data telah tersedia pada sistem	Peningkatan penggunaan sistem informasi	Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	predikat	70,30	5.364.340.708	70.3	76,15	108%	Tuntas	Pada periode penilaian SAKIP baru pada tahap *desk* konfirmasi data dukung	Penyiapan data dukung SAKIP	Kepala Dinas
18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah**	%	100	5.629.365.719	75	75	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Optimalisasi sumberdaya pendukung	Kepala Dinas
18.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	3	6.938.000	3	3	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Optimalisasi sumberdaya pendukung	Sekretaris
18.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.524.000	2	5	250%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Optimalisasi sumberdaya pendukung	Tim Kerja PEP
18.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1	3.414.000	1	1	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Optimalisasi sumberdaya pendukung	Tim Kerja PEP
18.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	3.531.127.719	9	9	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Optimalisasi sumberdaya pendukung	Sekretaris

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25	3.531.127.719	25	25	100%	Tuntas	Terdapat ASN yang pensiun	Penimgkatan pelaksanaan TW berikutnya	Tim Kerja Keuangan
18.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	dokumen	2	58.196.000	1	1	100%	Tuntas	Saat ini baru tahap perencanaan	Identifikasi jenis diklat dan bimtek	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	dokumen	4	15.596.000	2	1	0%	Belum Tuntas	Pengiriman diklat sesuai dengan prioritas dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	Identifikasi jenis diklat	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	40	42.600.000	40	0	0%	Belum Tuntas	Saat ini sedang pada tahap perencanaan/ identifikasi prioritas kegiatan	Kegiatan direncanakan pada Tri Wulan IV	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	628.634.000	9	9	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Komitmen pencapaian target kinerja	Sekretaris
18.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	35.570.000	3	3	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6	268.455.000	6	6	100%	Tuntas	Peningkatan realisasi kinerja untuk mendukung operasional kantor	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	69.630.000	3	3	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	96.875.000	2	3	150%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	25	100.000.000	18	46	256%	Tuntas	Peningkatan koordinasi luar kota	Komitmen pencapaian target kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	13.000.000	1	1	100%	Tuntas	Peningkatan koordinasi luar kota	Peningkatan pelaksanaan TW berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	39.104.000	1	0	0%	Tuntas /Belum Tuntas	Saat ini sedang pada tahap perencanaan/ identifikasi prioritas sasaran	Kegiatan direncanakan pada Tri Wulan III	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	laporan	2	207.948.241	2	2	100%	Tuntas	Saat ini pada tahap perencanaan	Peningkatan pelaksanaan TW berikutnya	Sekretaris
18.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	53.340.000	2	2	100%	Tuntas	Terdapat perubahan rencana pelaksanaan	Pelaksanaan sesuai jadwal	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	4	154.608.241	2	2	100%	Tuntas	Terdapat perubahan rencana pelaksanaan	Pelaksanaan diharapkan sesuai jadwal	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	914.714.000	9	9	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Sekretaris
18.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	4.994.000	3	3	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	450.000.000	3	3	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Penyediaan jasa sesuai kebutuhan prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	78.682.000	3	3	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Penyediaan jasa sesuai kebutuhan prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	381.028.000	3	3	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Penyediaan jasa sesuai kebutuhan prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	laporan	2	281.807.759	9	2	22%	Belum Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Pelaksanaan kegiatan sesuai prioritas	Sekretaris
18.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	59.470.000	3	3	100%	Tuntas	Kendaraan masih dalam kondisi yang cukup baik	Pemeliharaan/ perbaikan kendaraan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	106.840.000	16	13	81%	Belum Tuntas	Kendaraan masih dalam kondisi yang cukup baik	Pemeliharaan/ perbaikan kendaraan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	57	10.461.000	40	40	100%	Tuntas	Sebagian mebel masih cukup layak	Pemeliharaan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	3	18.260.000	3	3	100%	Tuntas	Sebagian masih cukup layak	Pemeliharaan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	43.720.000	1	1	100%	Tuntas	Beberapa bagian gedung telah perlu dilakukan perbaikan	Perbaikan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	51	43.720.000	30	35	120%	Tuntas	Sebagian sarpras gedung masih cukup layak	Pemeliharaan sesuai prioritas	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan III Tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yang perlu dilaksanakan pada periode triwulan selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Uraian Kondisi Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan III Tahun 2024	Tindak Lanjut	Keterangan
18.04.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan masih terus berjalan	Peningkatan progres kegiatan	Belum Tuntas
18.05.01. 01	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Kegiatan masih terus berjalan	Peningkatan progres kegiatan	Belum Tuntas
18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sebagian telah direalisasi	Peningkatan progres kegiatan	Belum Tuntas
18.01.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sebagian telah direalisasi	Peningkatan progres kegiatan	Belum Tuntas
18.01.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Saat ini sedang pada tahap perencanaan/ identifikasi prioritas kegiatan	Kegiatan direncanakan pada Tri Wulan IV	Belum Tuntas
18.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sebagian kegiatan telah direalisasikan	Pelaksanaan diharapkan sesuai jadwal	Belum Tuntas
18.01.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sebagian kegiatan telah direalisasikan	Pelaksanaan diharapkan sesuai jadwal	Belum Tuntas

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen sampai dengan triwulan III tahun 2024 baik kegiatan yang telah terlaksana dengan baik.

a. Capaian Kinerja Tujuan 1: Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dengan Indikator, Jumlah Nilai investasi tercapai **175 %** atau dengan kategori **Sangat Baik**;
b. Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan Indikator Jumlah PMA/ PMDN tercapai sebesar **406%** atau dengan kategori **Sangat Baik**;

2. Saran

Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat kami sampaikan saran;

1. Penguatan dalam pencapaian realisasi penanaman modal dan PMA/PMD dengan pemberian kemudahan layanan perizinan berusaha.
2. Percepatan dalam pencapaian realisasi kinerja terhadap 7 (tujuh) rekomendasi/ saran tersebut di atas, sehingga target kinerja tahun 2024 dapat tercapai.

E. PENUTUP

Demikian laporan hasil evaluasi Rencana Aksi Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Triwulan III Tahun 2024, dapat terus meningkatkan pencapaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja, yang telah ditetapkan.

Sragen, Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sragen

Dwi Agus Prasetyo, S.STP, M.Si
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr.Soetomo No.5 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website : http://dpmptsp.sragenkab.go.id Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN-57213

LAPORAN MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Monitoring dan evaluasi merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring dan evaluasi ini merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan kinerja yang telah berlangsung di DPMPTSP Kabupaten Sragen sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2024 yang telah disusun.

Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada periode berikutnya.

2. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen bertujuan untuk menilai tingkat capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun pada awal Tahun Anggaran 2024. Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan di periode berikutnya pada tahun berjalan.

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2024 dan dilaksanakan pada periode Triwulan III Tahun 2024.

4. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2024, pada Triwulan IV dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang riil atas pelaksanaan capaian kinerja dari rencana aksi tahunan yang telah disusun untuk Triwulan IV Tahun 2024, yang memuat perkembangan progress/ kemajuan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana tugas masing-masing program, kegiatan, subkegiatan sampai dengan rincian aktivitas.

Hasil evaluasi ini selain sebagai dasar evaluasi atas capaian kinerja juga sekaligus dapat dijadikan untuk memberikan rekomendasi dalam menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

C. HASIL YANG DICAPAI

Rencana Aksi Tahun 2024 ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang pada Tabel 1.

Sedangkan hasil pencapaian per Triwulan IV Tahun 2024, realisasi capaian kinerja diuraikan sebagaimana Tabel 2;

TABEL 1
RENCANA AKSI KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN
TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN TRIWULAN IV	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	Nilai investasi dalam tahun berjalan	trilyun rupiah	1,600	6.860.892.024	1,600	Kepala Dinas
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	Jumlah PMA/ PMDN berdasarkan jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam tahun berjalan.	investor	3.000	6.860.892.024	3.000	Kepala Dinas
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan Pengembangan iklim penanaman modal yang disusun**	(kebijakan penanaman modal tahun n/jumlah kebijakan yang akan disusun) x 100 %	**%**	40	120.000.000	40	Kepala Dinas
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi	Dokumen tahun n	dokumen	1	120.000.000	1	Koord Penanaman Modal
18.02.02.01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dokumen tahun n	dokumen	1	120.000.000	1	
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/ besar**	(penanaman modal terealisasi/ jumlah minat penanaman modal) x 100%	**%**	20	128.356.500	20	Kepala Dinas
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah even promosi	Jumlah even promosi tahun n	kali	2	128.356.500	2	Koord Penanaman Modal
8.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen tahun n	Dokumen	2	128.356.500	2	Tim Kerja Promosi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan**	nilai indeks pada tahun n	Poin	84,00	381.247.000	84,00	Kepala Dinas
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	(jumlah SP/jml layanan perizinan & nonperizinan berdasarkan kewenangan) x 100%	%	100	381.247.000	100	Koord PTSP
18.04.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan usaha Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan usaha tahun n	Pelaku usaha	150	70.000.000	150	TimKerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
18.04.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah permohonan perizinan berusaha nonperizinan tahun n	Pelaku Usaha	1.250	113.264.000	1.250	TimKerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
18.04.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pemohon layanan konsultasi dan informasi tahun n	Orang	80	45.000.000	80	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.04.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang perizinan Berusaha Berbasis Risiko	jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pemeriksaan perizinan berusaha dan nonperizinan tahun n	Kegiatan Usaha	500	152.983.000	500	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	(jumlah pelaku usaha kecil menengah & besar yang menyampaikan LKPM/ jumlah pelaku usaha kecil menengah dan besar) x 100%	**%**	10	582.619.000	10	Kepala Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	(Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan yang dilaksanakan/ Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan sesuai kewenangan) x 100%	**%**	100	582.619.000	100	Koord Penanaman Modal
18.05.01.05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tahun n	Pelaku Usaha	210	407.834.000	210	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan
18.05.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusahatahun n	Kegiatan Usaha	100	174.785.000	100	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik**	(jumlah jenis data yang tersusun dengan baik/ jumlah jenis data yang seharusnya disediakan) x 100 %	%	50	32.000.000	50	Kepala Dinas
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan	(jumlah penyediaan data jenis izin/ jumlah Perizinan yang didelegasikan) x 100%	%	50	32.000.000	50	Koord PTSP
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah dokumen dan data informasi perizinan dan nonperizinan yang disusun tahun n	Dokumen	1	32.000.000	1	Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah tahun n-1	predikat	70,30	5.364.340.708	70,30	Kepala Dinas
18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah**	(Jumlah kegiatan pada urusan penunjang yang dilaksanakan/ jumlah kegiata n pada urusan penunjang yang menjadi kewenangan) x 100%	%	100	5.616.669.524	100	Kepala Dinas
18.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun pada tahun n	Dokumen	4	4.338.000	4	Sekretaris
18.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen perencanaan yang disusun pada tahun n	Dokumen	2	2.224.000	2	Tim Kerja PEP
18.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	dokumen capaian kinerja yang disusun pada tahun n	dokumen	1	2.114.000	1	Tim Kerja PEP
18.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun n	bulan	12	3.478.501.218	12	Sekretaris
18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tahun n	Orang/ bulan	25	3.478.501.218	25	Tim Kerja Keuangan
18.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah tahun n	dokumen	2	104.538.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	jumlah pegawai yang mengikuti diklat tahun n	dokumen	3	10.118.000	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti bimtek tahun n	orang	40	94.420.000	40	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	607.279.000	12	Sekretaris
18.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	penyediaan paket komponen instalasi listrik tahun n	paket	4	35.570.000	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	paket	8	276.654.000	8	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	penyediaan paket logistik tahun n	paket	4	75.180.000	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	penyediaan paket barang cetakan dan penggandaan tahun n	Paket	4	91.375.000	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	penyediaan dokumen bahan bacaan tahun n	dokumen	2	4.000.000	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan biaya perjalanan dinas luar daerah non kegiatan tahun n	laporan	35	111.500.000	35	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen penataausahaan arsip tahun n	Dokumen	1	13.000.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun n	dokumen	1	39.104.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	laporan pengadaan barang	laporan	2	230.297.306	2	Sekretaris
18.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket pengadaan mebel tahun n	Paket	2	53.340.000	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor bangunan lainnya yang disediakan	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n	unit	3	176.957.306	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n	Bulan	12	916.712.000	12	Sekretaris
18.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan jasa surat menyurat tahun n	laporan	4	4.994.000	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik tahun n	Laporan	4	466.936.000	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	Laporan	4	72.256.000	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	penyediaan jasa tenaga harian lepas tahun n	Laporan	4	372.526.000	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	laporan pemeliharaan barang milik daerah tahun n	laporan	2	275.004.000	12	Sekretaris
18.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan tahun n	Unit	3	57.681.000	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan operasional atau lapangan tahun n	unit	16	102.228.000	16	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	pemeliharaan mebel tahun n	unit	57	16.011.000	57	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	pemeliharaan aset tetap tahun n	unit	3	15.760.000	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	pemeliharaan gedung kantor tahun n	unit	1	43.720.000	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dire habilitasi	pemeliharaan sarana dan prasarana gedung tahun n	unit	51	39.604.000	51	Kasubag Umum dan Kepegawaian

TABEL 2

MONITORING EVALUASI KINERJA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

TRIWULAN IV TAHUN 2024

No	Tujuan/ Sasaran / Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Anggaran	Target Tri Wulan IV	Realisasi Tri Wulan IV	Capaian Tri Wulan IV	Ket	Analisa Capaian		Penanggung jawab
										Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	trilyun rupiah	1,600	6.860.892.024	1,6	2.3	143%	Tuntas	Meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi, terutama layanan dengan adanya layanan *Online Single Submission Risk Based Aproch* (OSS-RBA)	Peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting demi menarik minat calon investor untuk menanamkan modal	Kepala Dinas
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	investor	3.000	6.860.892.024	3.000	10.995	367%	Tuntas	Peningkatan PMA/PMDN dipengaruhi oleh faktor meningkatnya kualitas layanan bidang perizinan dan investasi	peningkatan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi	Kepala Dinas
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan Pengembangan iklim penanaman modal yang disusun**	**%**	40	120.000.000	40	40	100%	Tuntas	Saat ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Peningkatan progres kegiatan	Kepala Dinas
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi	dokumen	1	120.000.000	1	1	100%	Tuntas	Saat ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Peningkatan progres kegiatan	Koord Penanaman Modal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.02.02.01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	dokumen	1	120.000.000	1	1	100%	Tuntas	Saat ini masih dalam tahap pemilihan penyedia	Peningkatan progres pelaksanaan kegiatan	
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/ besar**	**%**	20	128.356.500	20	27	135%	Tuntas	Kemudahan dalam informasi peluang investasi	Peningkatan layanan investasi	Kepala Dinas
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah even promosi	kali	2	128.356.500	2	2	100%	Tuntas	Saat ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Peningkatan progres kegiatan	Koord Penanaman Modal
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	128.356.500	2	2	100%	Tuntas	Tahap pemilihan lokasi dan waktu pameran	Peningkatan progres kegiatan	Tim Kerja Promosi
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan**	Poin	84,00	381.247.000	84,00	90.25	107%	Tuntas	Kemudahan layanan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan	Kepala Dinas
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	%	100	381.247.000	100	100	100%	Tuntas	Komitmen peningkatan kualitas layanan	Identifikasi kualitas layanan	Koord PTSP
18.04.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota		150	70.000.000	150	150	100%	Tuntas	Tahap perencanaan, penetapan pelaku usaha	Peningkatan progres kegiatan	Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.04.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1.250	113.264.000	1.250	1.723	137%	Tuntas	Kemudahan layanan perizinan dan nonperizinan	Peningkatan kualitas layanan dengan berpedoman pada SOP dan SP	Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
18.04.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Orang	80	45.000.000	80	89	111%	Tuntas	Meningkatnya kualitas layanan	Peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan pengaduan	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.04.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kegiatan Usaha	500	152.983.000	500	654	131%	Tuntas	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan nonperizinan	Peningkatan kualitas layanan dengan berpedoman pada SOP dan SP	Tim Kerja Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**%**	10	582.619.000	10	54	540%	Tuntas	Kemudahan layanan LKPM melalui sistem	Peningkatan pendampingan LKPM	Kepala Dinas
18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	**%**	100	582.619.000	100	100	100%	Tuntas	Kemudahan layanan LKPM melalui sistem	Peningkatan pendampingan penyusunan laporan	Koord Penanaman Modal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.05.01.01	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku Usaha	210	407.834.000	410	410	100%	Tuntas	Kegiatan sesuai rencana	Komitmen pelaksanaan kegiatan seusai rencana	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan
18.05.01.02	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan di verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan	Kegiatan Usaha	100	174.785.000	100	132	132%	Tuntas	Terdapat perubahan dalam penjadwalan kegiatan	Penjadwalan ulang kegiatan	Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	%	50	32.000.000	50	100	100%	Tuntas	Sumber data telah tersedia pada sistem	Peningkatan penggunaan sistem informasi	Kepala Dinas
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Persentase penyediaan data informasi perizinan/ nonperizinan	%	50	32.000.000	50	100	100%	Tuntas	Sumber data telah tersedia pada sistem	Peningkatan penggunaan sistem informasi	Koord PTSP
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrsi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Dokumen	1	32.000.000	1	4	100%	Tuntas	Sumber data telah tersedia pada sistem	Peningkatan penggunaan sistem informasi	Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2	**Sasaran Penunjang: Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah**	**predikat**	**70,30**	**5.364.340.708**	**70.3**	**76,15 (BB)**	**108%**	**Tuntas**	**Implementasi SAKIP telah dijalankan dengan baik**	**Peningkatan implementasi SAKIP**	**Kepala Dinas**
18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**5.616.669.524**	**100**	**100**	**100%**	**Tuntas**	**Capaian kinerja sesuai rencana**	**Peningkatan kualitas kinerja**	**Kepala Dinas**
18.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	4	4.338.000	4	4	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Sekretaris
18.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	2.224.000	2	3	150%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Tim Kerja PEP
18.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	dokumen	1	2.114.000	1	1	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Tim Kerja PEP
18.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	3.478.501.218	12	12	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Sekretaris
18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25	3.478.501.218	25	23	92%	Belum Tuntas	Terdapat ASN yang pensiun	Peningkatan pelaksanaan periode berikutnya	Tim Kerja Keuangan

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	dokumen	2	104.538.000	2	2	100%	Tuntas	Capaian kinerja sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	dokumen	3	10.118.000	3	1	33%	Belum Tuntas	Pengiriman diklat sesuai prioritas dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	Peningkatan pelaksanaan periode berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	40	94.420.000	40	40	100%	Tuntas	Saat ini sedang pada tahap perencanaan/ identifikasi prioritas kegiatan	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	607.279.000	12	12	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Sekretaris
18.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	4	35.570.000	4	4	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	8	276.654.000	8	10	125%	Tuntas	Peningkatan realisasi kinerja untuk mendukung operasional kantor	Peningkatan kualitas kinerja serta penetapan target sesuai capaian kinerja periode terakhir	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	4	75.180.000	4	4	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	91.375.000	4	4	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dkumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	2	4.000.000	2	2	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	35	111.500.000	35	52	149%	Tuntas	Peningkatan koordinasi luar kota	Peningkatan kualitas kinerja serta penetapan target sesuai capaian terakhir	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	13.000.000	1	1	100%	Tuntas	Peningkatan koordinasi luar kota	Peningkatan pelaksanaan TW berikutnya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	laporan	2	230.297.306	2	2	100%	Tuntas	Saat ini pada tahap perencanaan	Peningkatan pelaksanaan tahun berikutnya	Sekretaris
18.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	53.340.000	2	3	150%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja dan penetapan target sesuai capaian terakhir	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	3	176.957.306	3	3	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	916.712.000	12	12	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Sekretaris
18.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	4.994.000	4	4	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	466.936.000	4	4	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	72.256.000	4	4	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	372.526.000	4	4	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	laporan	2	275.004.000	2	2	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Sekretaris
18.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	57.681.000	3	3	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.01.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	102.228.000	16	16	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	57	16.011.000	57	57	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.07	Pemeliharaan asset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	3	15.760.000	3	3	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	43.720.000	1	1	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	51	39.604.000	51	51	100%	Tuntas	Pelaksanaan sesuai rencana	Peningkatan kualitas kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yang perlu dilaksanakan pada periode selanjutnya, antara lain sebagaimana berikut:

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Uraian Kondisi Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2024	Tindak Lanjut	Keterangan
18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terdapat ASN yang mutasi dan pensiun	Penyusunan gaji dan tunjangan mempertimbangkan jumlah ASN	Belum Tuntas
18.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Proses pengajuan telah dilakukan kepada instansi penyelenggara, namun tidak pemanggilan	Disusun rencana diklat bagi ASN dan non ASN	Belum Tuntas

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen sampai dengan triwulan IV tahun 2024 baik kegiatan yang telah terlaksana dengan baik.

a. Capaian Kinerja Tujuan 1: Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dengan Indikator, Jumlah Nilai investasi tercapai **143 %** atau dengan kategori **Sangat Baik**;
b. Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan Indikator Jumlah PMA/ PMDN tercapai sebesar **367%** atau dengan kategori **Sangat Baik**;

Adapun pencapaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Dinas DPMPTSP Kabupaten Sragen secara umum tidak terdapat permasalahan berarti dalam arti kinerja yang dilaksanakan telah mencapai target yang telah disusun sebelumnya.

2. Saran

Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat kami sampaikan saran;

a. Pencapaian realisasi kinerja atas target kinerja agar dipertimbangkan dan dilakukan peninjauan atas capaian kinerja di akhir tahun sebagai dasar dalam penetapan target kinerja tahun berikutnya.
b. Terhadap capaian Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN agar memperhatikan jumlah ASN baik yang sudah existing maupun hasil dari seleksi CPNS atau PPPK.

E. PENUTUP

Demikian laporan hasil evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024, dapat terus meningkatkan pencapaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja, yang telah ditetapkan.

Sragen, Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sragen

Dwi Agus Prasetyo, S.STP, M.Si
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
S R A G E N - 57213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 052/61 /18/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2024;

Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
j. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
k. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan

dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;

c. mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
d. melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
e. menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
f. menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 05-01-2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Sragen;
2. Kepala Baperida Kabupaten Sragen;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
5. Kepala Bagian Organisasi
6. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 052/61 /18/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA SISTEMAKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dwi Agus Prasetyo, S.STP, M.Si	Kepala	Penanggung jawab
2.	Yulius David Supriyadi, S.Sos, M.M	Sekretaris	Ketua
3.	Arif Bahtiar Rifai, SE	Perencana Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Erwan Adhitya Suddin, SH, MM	Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Penanaman Modal	Anggota
5.	Ilham Kurniawan, ST, MM	Analis Hukum Ahli Madya/ Koordinator pelayanan terpadu satu pintu	Anggota
7.	Dra. Ekowati Yuli Widyaningsih, M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Maya Widiyarti, S.Kom, M.Si	Analis Kebijakan Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan	Anggota
9.	Yustina Nugrahaeni, SS	Analis Hukum Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Informasi dan Pengolahan Data	Anggota
10.	Atikah Yuliana, SS	Analis Kebijakan Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Anggota

11.	Ariyanto, SE	Analis Hukum Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan dan nonperizinan	Anggota
12.	Suharpadmi, SH	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
13.	Ratih Poespitowati, SE	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
14.	Nasrun Nugroho, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
S R A G E N - 57213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 052/ 52 /18/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. mengkoordinasikan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan dokumen Pelaporan Kinerja;
b. mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
c. melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
d. menyampaikan dokumen pelaporan kinerja kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 06-01-2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Sukowati No.255A Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
S R A G E N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 052/ 1089 /18/2022

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data kinerja lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 66 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022 merupakan acuan bagi pejabat dan pemegang kepentingan dalam melaksanakan pengumpulan data capaian kinerja lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 06 - 10 - 2022

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan



TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19670708 199303 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN NOMOR 052/ 1089/18/2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pengambilan keputusan (*decision making*) haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada intuisi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data (*data analysis*) menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain, meliputi majalah, surat kabar, buku, dan laporan lainnya. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja (*performance management system*) organisasi. Keberhasilan *knowledge management* di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal (*reliable*), relevan (*relevance*) dan lengkap (*completness*).

Suatu organisasi yang besar dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai- nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Sehingga, jika budayanya solid, manifestasinya bisa terlihat dari perilaku, dan jika perilakunya telah sesuai dengan nilai organisasi, maka secara tidak langsung kinerjanya juga akan meningkat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Agar data pencapaian kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022 dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data kinerja.

1.2. Dasar Hukum

a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan ;
d) Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

1.3. Tujuan

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap triwulan dalam satu tahun, secara umum bertujuan untuk :

a) Mengumpulkan data realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen
b) Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di

Penetapan Kinerja (Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK)).

c) Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK), serta menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

1.4. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja ini adalah:

a) Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran Perangkat Daerah di semua jenjang pelaksanaan.

b) Terukurnya *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c) Meningkatnya kooordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran.

1.5. Ruang lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Sragen memuat ketentuan mengenai:

a) Data Kinerja IKU dan IK yang dikumpulkan;

b) Metodologi pelaksanaan pemantauan/monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja;

c) Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.

1.5 Pengertian dan Istilah

a) **Pemantauan (*Monitoring*)** adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome, benefit* dan *impact* yang diharapkan;

b) **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indicator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematik dan obyektif serta

terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai;

c) **Indikator Kinerja** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
d) **lndikator Kinerja Utama (IKU)/** ***Key Performance Indicators (KPIs)*** adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan, sasaran strategis suatu organisasi.
e) **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan atau target kinerja yang akan dicapai.
f) **Pengukuran Kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.
g) **Pelaporan data kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program kegiatan dan atau sub kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

BAB II

JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN

Data indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU menggambarkan capaian kinerja tujuan, sasaran strategis/sasaran penunjang, program Perangkat Daerah, sedangkan IKK menggambarkan capaian kinerja, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

3.1. Data Indikator Kinerja Utama (IKU)

Data Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
1	2	3
1.	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal
1.1	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah
18.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
18.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun
18.3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/ besar

18.4	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan
18.5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM
18.6	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik

3.3. Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yaitu dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja). Data IKK yang menjadi indikator keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

NO	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN
18.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah
18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
18.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
18.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut
18.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah
18.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
18.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

18.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
18.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
18.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
18.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
18.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah
18.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
18.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
18.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan [unit]
18.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
18.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
18.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
18.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

18.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah
18.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
18.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
18.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi
18.02.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan
18.04.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
18.04.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal
18.04.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya

	terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
18.04.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah
18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
18.05.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
18.05.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
18.05.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/ nonperizinan
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

BAB III
MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pengumpulan data capaian kinerja menggunakan metode *bottom up*. Data diperoleh dari unit lebih bawah lalu dikumpulkan di unit di atasnya. Untuk mempermudah pengujian ketepatan pengukuran kinerja, maka data capaian harus disampaikan secara lengkap dan dilengkapi dokumen pendukung atas capaian kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan dan triwulan) dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

4.1. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran dan evaluasi IKU dan indikator penting lainnya (sasaran penunjang, program), mengikuti ketentuannya sebagai berikut :

(1) Pengukuran IKU dilakukan maksimal 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Setda dan Bapperida.

(2) Pengukuran IKU dilakukan oleh Tim yang dibentuk Dinas Kabupaten Sragen.

(3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membentuk Tim Pengumpulan Data IKU (lintas bidang) untuk membantu melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam rangka Pengumpulan Data IKU, dan dibuat dalam bentuk *soft-copy*, kemudian diunggah (*upload*) pada *e_sakip* dan *e_monevrkpd*.

(4) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai koordinator dan bertanggung jawab di tingkat Perangkat Daerah.

4.2. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan pengumpulan data kinerja kegiatan dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut :

(1) Setiap Pejabat Administrator/Pengawas/Fungsional yang setara melaporkan hasil kinerja kegiatan/Sub Kegiatannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilakukan secara berkala setiap bulan atau triwulan.

(2) Rekapitulasi laporan kinerja kegiatan berkala yang sudah terkumpul dan telah divalidasi oleh pimpinan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan (Laporan POK) dan Bapperida (Monev Triwulan).

(3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat membentuk tim kerja untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan dan mekanisme kerja sebagai acuan.

4.3. Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sementara (*) dan data akhir, sesuai dengan perkembangan capaian dan realisasi. Kondisi ini memungkinkan untuk dilakukan koreksi untuk perbaikan data kinerja.

BAB IV.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan dalam rangka evaluasi IKU dan IKK untuk menilai sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya harus dikaitkan dengan sumber (input atau masukan) yang berada dibawah kewenangannya seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Analisis dalam evaluasi kinerja dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai dengan melakukan pengukuran kinerja, dan dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan.

Dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dilakukan melalui:

(1) Pembandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya.

(2) Analisis-analisis terhadap terjadinya:

a. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan

b. Menjelaskan manfaat dan dampak (baik yang negatif maupun positif) dari keberhasilan tersebut.

Agar penyampaian uraiannya dapat lebih fokus, analisis data dalam evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang dianalisis yaitu:

(1) Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Pada tahapan ini analisis dilakukan dengan menggunakan ukuran prosentase fisik pencapaian indikator kinerja kegiatan (kegiatan dan Sub Kegiatan).

(2) Evaluasi Kinerja Utama

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada dasarnya menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja utama dan kinerja lainnya (tujuan/sasaran strategis, sasaran penunjang dan program) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dengan didasarkan pada evaluasi kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi kinerja utama dan kinerja lainnya. Hal ini untuk menjelaskan sejauh mana target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dicapai beserta hal-hal yang menjadi pendukung ataupun penghambat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Penjelasan kinerja kegiatan dapat dilakukan secara parsial maupun dianalisis antar kegiatan yang berkaitan sehingga dapat dijelaskan bagaimana kontribusi setiap kegiatan terhadap pencapaian kinerja utama.

BAB V.

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja ini merupakan acuan yang harus dipedomani bagi para pelaksana pengumpulan data, analisis, sampai dengan pelaporan capaian kinerja O*utcome* dan O*utput* sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tujuan dan sasaran yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen merupakan rangkaian kegiatan sebelum dilakukan pengukuran *Outcome* dan *Output* sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data kinerja juga berfungsi sebagai rangkaian / proses penyampaian laporan kinerja berkala dalam rangkaian pertanggungjawaban kepada Bupati Sragen. Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pihak di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data capaian kinerja ini disusun selaras dengan perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama ini. Namun demikian, sebagai suatu acuan bagi perwujudan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, Petunjuk Pelaksanaan ini tentu masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu, masukan positif bagi penyempurnaan Juklak ini tetap diperlukan agar tujuan pengumpulan data kinerja sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih baik lagi.

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan



TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19670708 199303 1 010

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS
PM PTSP
SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	:	980/109/18/2022
Tanggal pembuatan	:	06 - 10 - 2022
Tanggal revisi	:	-
Tanggal pengesahan	:	06 - 10 - 2022
Disahkan oleh	:	PLT KEPALA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN Asisten Perekonomian dan Pembangunan TUGIYONO, SH NIP. 196708 199303 1 010
Judul SOP	:	**Pengumpulan Data Kinerja**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;	1 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang perencanaan kinerja;
2 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;	2 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pengukuran kinerja;
3 Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	3 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pelaporan kinerja;
4 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016	4 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP); dan
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	5 Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6 Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Surat Masuk	1 APBD, RKA, DPA.
2	2 Dokumen Perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, RKT, RENCANA AKSI, PERJANJIAN KINERJA).
3	3 Perangkat Pengolahan Data.

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting bagi penyelenggaraan manajemen kinerja di DPMPTSP Kabupaten Sragen	Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan evaluasi Kinerja
2 Harus dilaksanakan sebagai ukuran keberhasilan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas di DPMPTSP Kabupaten Sragen.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PM PTSP

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris / Koord	Subkor PEP	Kasubag/ Subkor				
1	Sekretaris menugaskan Subkor PEP untuk melaporkan data kinerja		Mulai			Instruksi	15 menit	Disposisi	
2	Menyiapkan kertas kerja laporan kinerja dan mengirimkan ke setiap bidang untuk diisi.					DPA, Laporan kinerja periode sebelumnya	45 menit	Kertas kerja laporan kinerja per bidang	
3	Menerima kertas kerja laporan kinerja, mengukur dan mengisi data capaian kinerja dan menyerahkan kepada Kabid					Kertas kerja laporan kinerja, SPJ, data pendukung laporan kinerja	3 hari	Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja per	
4	Memeriksa kertas kerja laporan kinerja. Jika **Ya**, menandatangani kertas kerja laporan kinerja. Jika **Tidak**, mengembalikan kepada Kasubag/ Subkor untuk menyempurnakan. Selanjutnya menyerahkan kepada Subkor PEP.					Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja, SPJ, data pendukung laporan kinerja	60 menit	Kertas kerja laporan kinerja per rumpun yang ditandatangani	
5	Menerima berkas kertas kerja laporan kinerja dan menginput data capaian kinerja pada Laporan kinerja. Menyerahkan kepada Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf.					Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja, SPJ, data	45 menit	Draft laporan laporan kinerja	
6	Sekretaris menerima dan memeriksa draft laporan laporan kinerja. Jika **Ya**, menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk dimintakan tanda tangan. Jika **Tidak**, menugaskan Subkor PEP untuk menyempurnakan.					pendukung laporan kinerja	15 menit	Draft laporan laporan kinerja	
7	Memeriksa draf laporan kinerja. Jika Ya, menandatangani laporan kinerja. Jika Tidak, menugaskan Sekretaris untuk menyempurnakan					Draft laporan laporan kinerja	10 menit	Laporan kinerja SKPD yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas	
8	menandatangani laporan kinerja. Jika **Tidak**, menugaskan Sekretaris untuk menyempurnakan			Selesai		Draft laporan laporan kinerja	10 menit	Dokumen laporan kinerja	

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Nomor SOP	01/DPMPTSP/82/29/2018
Tanggal pembuatan	26 Oktober 2018
Tanggal revisi	-
Tanggal pengesahan	02 Januari 2019
Disahkan oleh	KEPALA DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN Drs. IYUSEP WAHYUDI, MSi NIP. 19690907 199003 1 005
Judul SOP	**PENYUSUNAN LKjIP**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3 Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	1 Menguasai Mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD dan RPJMD) 2 Memahami Renstra DPMPTSP dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 Memahami Instrumen-instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4 Menguasai Komputer
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1 SOP Surat Masuk 2 3	1 Komputer 2 Printer 3 ATK
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
1 Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting bagi penyelenggaraan manajemen kinerja di DPMPTSP Kabupaten Sragen 2 Harus dilaksanakan sebagai ukuran keberhasilan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas di DPMPTSP Kabupaten Sragen.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan /Program di DPMPTSP Kabupaten Sragen.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala	Sekretaris	Kasubag PEP	JFU	Bidang-bidang Lain	Persyaratan	Waktu (hari)	Output	
1	Memberi arahan/ disposisi kepada Sekretaris koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP	Mulai					-Kertas disposisi, Surat dari Bupati/Inspektora	2	Disposisi	
2	Menerima, menealaah dan memberi arahan kepada Kasubbag PEP untuk menyiapkan bahan-bahan penyusunan LKjIP DPMPTSP						- Lembar disposisi	5	Disposisi	
3	Menerima, menelaah dan memerintahkan Kasubag PEP untuk mempersiapkan bahan penyusunan LKjIP						- Data awal	6	Laporan Persiapan Rapat	
4	Melaksanakan koordinasi/pengumpulan bahan dengan bidang-bidang lain dalam Penyusunan draft LKjIP dan menyampaikan kepada Kasubag PEP						- Data, Bahan dari bidang lain	10	bahan-bahan materi	
5	Menerima hasil inventarisasi materi untuk penyusunan draft LKjIP						- Data, Bahan dari bidang lain	3	Draft LKjIP	
7	Menelaah dan menganalisa materi Draft LKjIP						- Draft LKjIP, Data	3	Draft LKjIP	
8	Melakukan perbaikan/edit atas naskah draft LKjIP apabila masih perlu perbaikan						- Draft LKjIP, Data	1	Draft LKjIP	
9	Menerima, memeriksa, memaraf dan melaporkan kepada Sekretaris						- Draft LKjIP, Data	1	Draft Final LKjIP	
10	Menerima, memeriksa, memaraf draft LKjIP yang telah disusun dan melaporkan kepada Kepala Badan						- Draft Final LKjIP	2	Draft Final LKjIP	
11	Menerima, memeriksa dan menandatangani draft dokumen menjadi dokumen LKjIP DPMPTSP Kabupaten Sragen						- Draft Final LKjIP	1	Dokumen LKjIP	
12	Dokumen LKjIP didistribusikan kepada Sekretaris/Kasubag PEP dan Fungsional Umum sebagai arsip						Dokumen	1	Dokumen LKjIP	

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Memberikan Penghargaan Kepada

KABUPATEN SRAGEN

Sebagai

TERBAIK KETIGA

Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024

Menteri Investasi/Kepala BKPM

Rosan Perkasa Roeslani

PIAGAM PENGHARGAAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan Penghargaan Kepada:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 06 Desember 2024

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SRAGEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen
memberikan penghargaan kepada

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

Sebagai :

TERBAIK I

OPD terbaik pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik tahun 2023

Sragen, 20 Februari 2024
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen
Kepala

BADAN PUSAT STATISTIK * KABUPATEN SRAGEN *

CAHYO KRISTIONO

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) TAHUN 2024

DIBERIKAN KEPADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

Jakarta, 14 November 2024
Ketua Ombudsman Republik Indonesia

Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph..D.

98,07
NILAI

ZONA HIJAU
KUALITAS TERTINGGI